

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

TUGAS CAMAT DALAM MENGKOORDINASIKAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DI KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Islam Riau



RIA SUSANTI

NPM: 127310193

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2017

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk naskah skripsi yang sederhana ini saya persembahkan sebagai sedikit tanda bakti dan ucapan terima kasih saya kepada segenap hamba Allah SWT yang saya tuliskan berikut ini telah banyak berjasa dalam perjalanan kehidupan saya sampai saat ini.

Khusus Ayahanda **Muhammad Nasir (Alm)** bersama Ibunda **Rusmaini** yang tercinta. Terimakasih karena selalu berjuang dalam mencari nafkah dan biaya kehidupan dan pendidikan saya, tak mengenal lelah tak tau rasa capek, berjuang dari subuh sampai sore hanya untuk tujuan utama mencukupi kebutuhan anak-anaknya, supaya anak-anaknya bisa sekolah, terimakasih atas semuanya. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmatnya buat Ibunda tercinta dan semoga Allah SWT memberi ketenangan buat Ayahanda tersayang disana.

Kepada semua Abang dan Kakak saya yang pernah memberi bantuan berupa materi hanya semata untuk kelancaran studi ini dan membantu meringankan beban orang tua kita, supaya saya bisa menyelesaikan studi ini, terimakasih semoga Allah SWT selalu memberi rahmat dan hidayahnya buat abang dan kakak semua.

Kepada semua teman-teman sejurusan Ilmu Pemerintahan Khususnya lokal G angkatan 2012, terimakasih karena telah memberi semangat kepada saya.

Dan terimakasih untuk seseorang yang spesial **Zainal Mustafa** karena selalu memberi motivasi dan semangat dikala saya dalam kesusahan, dikala saya merasa lelah dan capek dalam menjalani hari-hari yang begitu berat karena harus menjalani dua peran yaitu **Kuliah** sambil **Kerja**, terimakasih karena selalu menyemangati saya. Semoga Allah SWT selalu melindungi kamu dan dikarunia dengan rahmat yang setimpal., Amin Yarabbal'alamin...

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin. Penulis mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar”**. Serta shalawat beriringan salam tak lupa pula penulis sampaikan kepada junjungan alam yakni Nabi Besar Muhammad SAW dengan ucapan “Allahumma Sholi’alla Muhammad Wa’alla Alihi Syayidina Muhammad”, beliau yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan kealam yang penuh ilmu pengetahuan.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak menemukan kesulitan dan hambatan. Alhamdulillah berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak semua dapat diatasi. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Detri Karya, SE. MA selaku Rektor Universitas Islam Riau yang selalu menjadi motivator untuk menyelesaikan studi.
2. Bapak Moris Adidi Yogia., M.Si selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Panca Setyo Prihati, S.IP, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan.
4. Bapak Dr. H. Syafhendry, M.Si sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan pada penulis sehingga selesainya penulisan skripsi ini.
5. Bapak Yendri Nazir, S. Sos. M.Si sakaligus Dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan pada penulis sehingga selesainya penulisan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah mendidik serta mengajar kepada penulis selama ini.
7. Seluruh Staf, Karyawan/ti Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu penulis menyelesaikan administrasi dan keperluan penulis.
8. Beserta teman-teman angkatan 2012 Ilmu Pemerintahan khususnya lokal G yang selalu memberi semangat dan selalu mendorong untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Dan terutama kepada Orang Tua ku, khususnya buat Ibu ku tercinta yang selalu berjuang melawan panasnya matahari, menghadapi dinginnya cuaca karena pagi-pagi harus beraktivitas untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan ku, dan buat almamarhum Ayah Ku tercinta terimakasih telah menjadi seorang Ayah yang bijaksana, yang menjadi inspirasi terbesarku untuk melawan kejamnya dunia, yang selalu mengajarkan ku akan arti kesabaran dan keiklasan dalam menghadapi masalah yang ada dan itu semua yang membuat aku untuk belajar membagi waktu antara bekerja dan melanjutkan kuliah untuk menyelesaikan skripsi ini, Terimakasih.

Mudah-mudahan segala bantuan, bimbingan saran dan arahan, petunjuk serta dorongan yang diberikan menjadi sumbangan yang tak terlupakan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan.

Pekanbaru, 03 Oktober 2017

Penulis

RIA SUSANTI

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFERENSI SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT.....	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	
A.Latar Belakang.....	1
B.Perumusan Masalah.....	19
C.Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	19
BAB II. STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A.Studi Kepustakaan.....	21
B.Perbandingan Skripsi Lain.....	42
C.Kerangka Pikiran	45
D.Konsep Operasional	47
E.Operasional Variabel	48
F.Teknik Pengukuran	49
BAB III. METODE PENELITIAN	

A. Tipe Penelitian.....	53
B. Lokasi Penelitian	53
C. Populasi dan Sampel.....	53
D. Teknik Penarikan Sampel.....	54
E. Jenis dan Sumber Data.....	55
F. Teknik Pengumpulan Data.....	55
G. Teknik Analisa Data	57
H. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	57

BAB IV. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kecamatan Kampar Kiri Hulu.....	59
B. Gambar Umum Kantor Camat Kampar Kiri Hulu	61
C. Struktur Kantor Camat Kampar Kiri Hulu	62
D. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Camat Kampar Kiri Hulu	63
E. Sumber Daya Kantor Camat Kampar Kiri Hulu.....	78

BAB V. PEMBAHASAN

A. Identitas Responden	80
B. Hasil dan Pembahasan Penelitian.....	82
C. Rekapitulasi Hasil Pembahasan.....	97

BAB VI. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	99
B. Saran	100

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Daftar Kepustakaan.....	101
B. Dokumentasi.....	116

DAFTAR TABEL

1.1 Data Penduduk Kecamatan Kampar Kiri Hulu	14
1.2 Daftar Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Mengenai Penyediaan Sarana dan Prasarana Untuk Pengembangan Usaha Tani Kecamatan Kampar Kiri Hulu	15
1.3 Daftar Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Mengenai Penyediaan Sarana dan Prasarana Untuk Pengembangan Usaha Ternak Kecamatan Kampar Kiri Hulu	17
1.4 Daftar Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Mengenai Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum Kecamatan Kampar Kiri Hulu.....	18
II.1 Operasional Variabel	48
III.1 Jumlah Populasi dan Sampel Di Kecamatan Kampar Kiri Hulu	54
III.2 Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian.....	57
IV.1 Daftar Pegawai Kantor Camat Kampar Kiri Hulu.....	79
V.1 Distribusi Responden Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin.....	81
V.2 Distribusi Responden Penelitian Berdasarkan Tingkat Umur.....	81
V.3 Distribusi Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	82
V.4 Pertemuan Resmi Di Kantor Camat Kampar Kiri Hulu.....	85
V.5 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Penelitian Mengenai Mengadakan Pertemuan Resmi.....	87
V.6 Tim Program Pemberdayaan Masyarakat	89

V.7 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Penelitian Mengenai	
Mengangkat Suatu Tim.....	90
V.8 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Penelitian Mengenai	
Membuat Buku Pedoman.....	92
V.9 Data Hadir Pertemuan Informal di Desa Gema	95
V.10 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Penelitian Mengenai	
Mengadakan Pertemuan Informal	96
V.11 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Penelitian Mengenai	
Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat	
Di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar	98

DAFTAR GAMBAR

II.1	Kerangka Pikir Tugas Camat Dalam Mengkoordinasi Pemberdayaan Masyarakat Di Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.....	46
IV.1	Struktur Kantor Camat Kampar Kiri Hulu.....	62



DAFTAR LAMPIRAN

1	:Daftar Kuisisioner Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.....	105
2	:Daftar Wawancara Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.....	110
3	:Daftar Teli Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.....	114
4	:Dokumentasi Penelitian Tentang Tugas Dalam Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.....	116
5	:Daftar Absensi Kehadiran Mengadakan Pertemuan Resmi.....	120
6	:Surat Keputusan Dekan Fisipol UIR No:852/UIR-Fs/Ktps/2016 Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa.....	121
7	:Surat Rekomendasi Penelitian Dari Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No:503/DMPTSP/NON IZIN-RISET/3762 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi.....	122
8	:Surat Rekomendasi Penelitian Dari Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik No:070/KKBP/2017/399 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi.....	123
9	:Surat Keterangan Dari Kantor Camat Kampar Kiri Hulu No:070/SET-KKH/144 Tentang Surat Keterangan Penelitian.....	124

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konfrehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ria Susanti
NPM : 127310193
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang : Strata Satu (S.1)
Pendidikan :
Judul Skripsi : Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konfrehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:


1. Bahwa naskah yang didaftarkan pada ujian konfrehensif karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaedah-kaedah metode penelitian dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa keseluruhan syarat administratif, akadenik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian seminar yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 03 Oktober 2017

Yang menyatakan,




Ria Susanti

**TUGAS CAMAT DALAM MENGKOORDINASIKAN KEGIATAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU**

KABUPATEN KAMPAR

Abstrak

Oleh : Ria Susanti

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar dan untuk mengetahui hambatan Tugas Camat sebagai Koordinator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Tipe penelitian ini adalah survey deskriptif dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul dan kemudian wawancara dengan key informan sebagai data pelengkap dan observasi untuk mengetahui keadaan lokasi dan kegiatan pemberdayaan yang telah pemerintah Kecamatan Kampar Kiri Hulu lakukan. Responden penelitian ini ialah Pemerintah Kecamatan Kampar Kiri Hulu terdiri dari Camat, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Desa dan Masyarakat Kecamatan Kampar Kiri Hulu yang seluruhnya berjumlah 43 sampel. Analisis data penelitian ini dilakukan secara deskriptif kuantitatif yang menggunakan tabulasi frekuensi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar pada umumnya dalam kategori cukup baik. Hasil penelitian ini didapatkan melalui penelitian terhadap variabel koordinasi yang terdiri dari 4 (empat) indikator yaitu : mengadakan pertemuan resmi, mengangkat suatu tim, membuat buku pedoman dan mengadakan pertemuan informal.

Kata Kunci : Koordinator, Pemberdayaan Masyarakat

**CAMAT ASSIGNMENT IN COORDINATING COMMUNITY EMPOWERMENT
ACTIVITIES IN KAMPAR KIRI HULU DISTRICT
KAMPAR DISTRICT**

ABSTRACT

By : Ria Susanti

The purpose of this study was to determine the Camat's Task in Coordinating Community Empowerment Activities in Kampar Kiri Hulu Subdistrict Kampuat Kabupaten Kampar and to find out the obstacles of the Camat's Duties as Coordinator of Community Empowerment Activities in Kampar Kiri Hulu Subdistrict. This type of research is a descriptive survey using a questionnaire as a means of gathering and then interviews with key informants as data equipment and observations to determine the location and empowerment activities that have been carried out by the Kampar Kiri Hulu District government. The respondents of this study were the District Government of Kampar Kiri Hulu District consisting of the District Head, the Community Empowerment Section, the Village Head and the Kampar Kiri Hulu District Community, totaling 43 samples. The data analysis of this study was conducted in quantitative descriptive using frequency tabulation. From the results of this study it can be concluded that the Camat's Task in Coordinating Community Empowerment Activities in Kampar Kiri Hulu Subdistrict Kampar Regency in general is quite good. The results of this study were obtained through research on coordination variables consisting of 4 (four) indicators, namely: holding an official meeting, appointing a team, making a guidebook and holding an informal meeting

Keywords: Coordinator, Community Empowerment

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk republik dan untuk mencapai tujuan Negara maka dibentuk sistem pemerintahan Indonesia yang meliputi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintahan pusat terdiri dari lembaga eksekutif yakni Presiden dan legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah pusat dapat menyelenggarakan sendiri atau dengan cara desentralisasi, melimpahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada perangkat pemerintah/wakil pemerintah di daerah berdasarkan azas dekonsentrasi, dan juga dapat menugaskan pemerintah daerah berdasarkan azas tugas pembantuan.

Dengan demikian, pembentukan pemerintah daerah sangat penting artinya dalam rangka untuk melaksanakan pelimpahan tugas dan wewenang oleh pemerintah pusat. Pembagian daerah-daerah atas wilayah besar dan kecil di Indonesia sebagai pelaksanaan pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mendasari pembentukan pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kota.

Penyelenggaraan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pada dasarnya lebih menitik beratkan kewenangan pada daerah Kabupaten/Kota, hal ini dikarenakan pada kenyataan daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan

pemerintahan sehari-harinya berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga dengan demikian daerah kabupaten/kota pulalah yang secara langsung maupun tidak langsung lebih memahami serta dapat menampung keluhan maupun kritikan serta sumbangan pemikiran dari masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 9 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni:

a. Urusan absolute

Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Untuk urusan pemerintahan absolute sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiscal nasional, dan agama.

b. Urusan pemerintahan konkuren

Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Untuk urusan konkuren sebagaimana di maksud dalam pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi dua yaitu:

1. Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan Dasar seperti : pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial
2. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah.

Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan daerah dan pemerintah pusat dalam urusan pilihan adalah sebagai berikut:

1. Urusan pemerintahan di bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
2. Urusan pemerintahan bidang energy dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak gas dan bumi menjadi kewenangan pemerintah pusat.

3. Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota

c. Urusan Pemerintahan umum

Adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 57 menyebutkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas kepala daerah, dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Pasal 58 menyatakan Penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan Negara yang terdiri atas:

a. Asas Kepastian Hukum

Yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara.

c. Asas Kepentingan Umum

Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

d. Asas Keterbukaan

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia.

e. Asas Proporsionalitas

Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Negara.

f. Asas Akuntabilitas

Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Asas Eektivitas

Asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

h. Asas Keadilan

Bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan Negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara.

Dibentuknya pemerintah pada awalnya adalah untuk melindungi sistem ketertiban di masyarakat sehingga seluruh masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupan dengan tenang dan lancar. Dinamika di masyarakat memperluas fungsi dan peran pemerintahan tidak hanya sebatas pelindung melainkan pelayan masyarakat. Rakyat tidak lagi harus melayani pemerintah seperti zaman kerajaan

ataupun penjajah namun justru pemerintah yang harus melayani, mengayomi, dan mengembangkan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat sesuai tujuan negaranya. Van Poelje (dalam Hamdi, 1999 : 52) menjelaskan bahwa pemerintahan dapat dipandang sebagai suatu ilmu yaitu yang mengajarkan bagaimana cara terbaik dalam mengarahkan dan memimpin pelayanan umum, Ada beberapa fungsi pemerintahan antara lain:

1. Fungsi primer

- a. Fungsi Pelayanan

Pemerintah harus berfungsi sebagai pelayan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini mungkin bisa diwujudkan dengan menyediakan barang dan jasa yang berkualitas tinggi bagi masyarakat dan sebagainya.

- b. Fungsi Pengaturan

Pemerintah harus berfungsi sebagai pembuat peraturan yang akan mengikat warganya. Selain membuat, pemerintah juga harus mensosialisasikan, menegakkan dan mengawasi pelaksanaan peraturan tersebut.

2. Fungsi Sekunder

- a. Fungsi Pembangunan

Pemerintah harus berfungsi sebagai pemacu pembangunan di wilayahnya, dimana pembangunan ini mencakup segala aspek kehidupan tidak hanya fisik tapi juga mental spiritual.

b. Fungsi Pemberdayaan

Pemerintah harus mampu memberdayakan warganya sehingga dapat menjadi sumber daya manusia yang tangguh dan berkompeten demi meningkatkan ketahanan bangsa.

Pemerintah Kecamatan yang mencakup wilayah pedesaan dan kelurahan sangat penting untuk diberdayakan sehingga dapat menunjang kemajuan daerah dan mensejahterakan masyarakatnya. Wilayah pedesaan dan kelurahan merupakan unit terkecil dalam pemerintahan daerah, akan tetapi memegang peranan penting dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang baik untuk mencapai kemajuan bangsa dan Negara. Keadaan pedesaan dan kelurahan dewasa ini telah lebih maju dibandingkan masa sebelumnya dan telah berkembang pesat, antara lain perkembangan bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Kegiatan pemerintahan dipedesaan pun semakin berkembang luas dan kompleks seperti bidang keamanan/ketertiban, pertanian, perindustrian, keagamaan.

Kecamatan merupakan eselon pemerintah terendah diatas pemerintahan desa, yang mempunyai tugas dan wewenang yang sangat luas terutama dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di wilayah kecamatan. Kondisi kecamatan pada saat sekarang ini sangat berbeda jauh dengan kondisi sebelumnya, dimana kecamatan adalah merupakan wilayah administrative dan kedudukan Camat sebelumnya adalah sebagai administrator yang mana Camat mempunyai wewenang secara sentral untuk mengkoordinasikan pembangunan berbagai instansi di tingkat Kecamatan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , bahwa kedudukan Kecamatan dirubah

menjadi perangkat daerah Kabupaten/Kota, yang mana menurut Undang-Undang ini Camat di angkat oleh Bupati atau Walikota atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat, Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dari Kabupaten/Kota serta tanggung jawab kepada Bupati/Kota.

Menurut pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, bahwa kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota. Hal ini berarti bahwa Kepala Daerah atau Bupati mempunyai kewenangan atas segala tugas dan tanggung jawab Camat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya didalam pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan dijelaskan camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prsarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan.
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan.

- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Berdasarkan pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tersebut, maka secara umum Camat mempunyai tugas yang cukup kompleks sebagai penyelenggara pemerintahan ditingkat kecamatan, yang mana salah satu tugas yang diemban Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan adalah mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya pada pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2008 Tentang kecamatan, ditegaskan bahwa : Tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan.
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.
- c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
- d. Melakukan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

- e. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat diwilayah erja kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat.

Kemudian sebagaimana yang ditegaskan pada penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan tersebut bahwa koordinasi yang dilakukan oleh Camat adalah untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi, dan interaksi keseluruhan kegiatan pemerintahan yang diselenggarakan dikecamatan, guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang efektif dan efisien. Koordinasi dimaksud dapat berbentuk rapat koordinasi, permintaan/penyampaian data, pemberian informasi, konsultasi, dan bentuk lainnya.

Adapun tugas pokok dan fungsi camat sebagai berikut:

1. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, camat mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan,
2. Perencanaan strategis di bidang perencanaan kegiatan Kecamatan,
3. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati,
4. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat,

5. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
6. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan,
7. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum,
8. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan,
9. Pelaksaaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Desa dan/atau Kelurahan,
10. Pelaksaaan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya,
11. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkungan Kecamatan.

Jika dilihat dari sudut normative, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda, agar semuanya terarah pada pencapaian tujuan tertentu pada saat yang telah ditetapkan. Dari sudut fungsional, koordinasi dilakukan guna mengurangi dampak negative spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja. (Ndraha, 2003 : 290)

Pemberdayaan masyarakat itu adalah suatu strategi yang digunakan pemerintah dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan dan meningkatkan kemampuan serta kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut Soetomo (2006:69) pemberdayaan masyarakat adalah sebuah pendekatan yang memberikan

kesempatan, wewenang yang lebih besar kepada masyarakat terutama masyarakat lokal untuk mengelola proses pembangunannya. Sehingga dengan melakukan pemberdayaan oleh pemerintah masyarakat dapat membangun kehidupan yang lebih baik.

Berhasilnya pelaksanaan pembangunan daerah tidak terlepas pula dari pengaruh berbagai faktor, dimana salah satu diantaranya yang tidak boleh diabaikan adalah membentuk kesamaan visi antara pemerintah dan masyarakat terhadap pembangunan tersebut. Sehingga pemerintah di satu pihak sebagai perencana dan pelaksana pembangunan akan berupaya semaksimal mungkin sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, sedangkan disisi lain masyarakat sebagai subjek pembangunan itu sendiri akan terdorong untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan tersebut. Oleh karena itu yang terpenting dalam pemberdayaan masyarakat adalah tercapainya kemandirian masyarakat dengan segala potensinya, malalui partisipasi dan swadaya masyarakat dalam proses pembangunan tersebut.

Namun demikian, keberhasilan program kegiatan pemberdayaan yang akan dilakukan di daerah sulit diwujudkan tanpa adanya upaya koordinasi dari pihak pemerintah. Oleh karena itu pihak pemerintah harus mampu mengkoordinasikan berbagai satuan kerja, baik yang merupakan unsur-unsur interen dari pada organisasi pemerintah maupun dari unsur swasta atau masyarakat.

Demikian pula halnya di Kabupaten Kampar Propinsi Riau, maka dalam rangka peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya juga sangat

diperlukan suatu program pemberdayaan tepat dan efektif. Kecamatan Kampar Kiri Hulu salah satu wilayah kecamatan yang berada di Kabupaten Kampar Propinsi Riau yang berbatasan dengan beberapa wilayah yang mana sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kampar Kiri, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kampar kiri, dan sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Sumbar. Luas wilayah Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan luas pemukiman 1.875 ha/m², luas perkebunan 75.750 ha/m², luas kuburan 40 ha/m², luas perkarangan 5.250ha/m², perkantoran 8 ha/m², dan luas prasarana umum lainnya 12ha/m², luas total wilayah keseluruhan yang dimiliki oleh Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar 81. 935 ha/m². Jenis tanah di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar itu Tanah Kering. Sementara Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar memiliki 24 Desa. Kecamatan Kampar kiri Hulu Kabupaten Kampar telah mengalami perkembangan relative pesat dewasa ini. Kecamatan Kampar Kiri Hulu merupakan Kecamatan yang masih minim akan pembangunan, oleh karena itu mereka sangat membutuhkan pemberdayaan karena Kecamatan Kampar Kiri Hulu kabupaten Kampar itu memiliki hasil bumi yang lumayan banyak seperti hasil tani berupa karet, sawit dan hasil ternak berupa kerbau, sapi dan kambing.

Adapun kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar antara lain sebagai berikut:

- a. Penyediaan sarana dan prasarana untuk pengembangan usaha tani dan ternak masyarakat meliputi:

- Pengadaan bibit unggul untuk pengembangan tanaman seperti bibit durian, sawit, karet, jagung dan cabe.
- Pengadaan ternak untuk pengembangan usaha peternakan masyarakat seperti sapi, kerbau, kambing.

b. Pengembangan kegiatan untuk pengembangan sarana dan prasarana fasilitas umum, yang meliputi:

- Pembangunan masjid raya
- Pelebaran jalan
- Pembukaan jalan
- Pembuatan jembatan

Oleh sebab itu, Camat sebagai pimpinan kecamatan dapat melakukan koordinasi secara maksimal dengan berbagai pihak baik koordinasi secara vertical maupun horizontal, demi keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Salah satu bentuk koordinasi yang penting dilakukan oleh Camat sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya adalah koordinasi dengan para Kepala Desa.

Kecamatan Kampar Kiri Hulu merupakan salah satu Kecamatan yang termasuk daerah wilayah Kabupaten Kampar, Kecamatan Kampar Kiri Hulu terdiri dari 24 desa yang mana memiliki jumlah penduduk 11.834 jiwa.

Tabel 1.1 : Data Penduduk Kecamatan Kampar Kiri Hulu

Desa	Jumlah Penduduk		Jumlah Jiwa	Jumlah KK
	Laki-laki	Perempuan		
1	2	3	4	5
Gema	548	456	1004	976

1	2	3	4	5
Tanjung Belit	329	277	606	470
Tanjung Belit Selatan	317	174	491	289
Kota Lama	310	274	584	461
Batu Sanggan	185	169	354	269
Aur Kuning	297	234	531	459
Ludai	209	172	381	259
Tanjung Karang	199	109	308	228
Batu Sasak	287	190	477	305
Pangkalan Kapas	198	188	386	233
Kebun Tinggi	209	182	391	209
Tanjung Beringin	199	219	418	397
Gajah Bertalut	276	209	485	309
Danau Sentul	298	176	474	357
Pangkalan Serai	187	218	405	298
Dua Sepakat	287	260	547	385
Terusan	419	329	748	557
Deras Tajak	295	174	469	359
Sungai Santi	290	199	489	127
Subayang Jaya	287	277	564	399
Tanjung Permai	275	189	464	376
Bukit Betung	177	209	386	231
Muara Bio	265	287	552	439
Lubuk Bigau	165	155	320	276
Jumlah	6508	5326	11834	8668

Sumber : Kantor Camat Kampar Kiri Hulu Tahun 2015/2016

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Kecamatan Kampar Kiri Hulu memiliki 24 Desa, yang mana dari keseluruhan Desa memiliki .11.834 Jiwa yang terdiri dari 6.508 berjenis kelamin Laki-laki dan 5.326 berjenis kelamin perempuan. Sementara Kepala Keluarga yang ada di Kecamatan Kampar Kiri Hulu sebanyak 8.668.

Dalam program kegiatan pemberdayaan ini seharusnya camat harus ikut berperan penting dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya di Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Untuk lebih jelas mengenai kegiatan

pemberdayaan masyarakat pada Kecamatan Kampar Kiri Hulu lihat tabel dibawah ini.

Tabel 1.2 : Daftar Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Mengenai Penyediaan Sarana dan Prasarana Untuk Pengembangan Usaha Tani Kecamatan Kampar Kiri Hulu.

No	Desa	Jenis Kegiatan	Jumlah/Bibit
1	Gema	Bibit Sawit	1000 batang
		Bibit Karet	5000 batang
		Bibit Durian	50 batang
2	Tanjung Belit	Bibit Sawit	1000 batang
		Bibit Karet	5000 batang
		Bibit Durian	50 batang
3	Tanjung Belit Selatan	Bibit Sawit	1000 batang
		Bibit Karet	5000 batang
		Bibit Durian	50 batang
4	Muara Bio	Bibit Sawit	1000 batang
		Bibit Karet	5000 batang
		Bibit Durian	50 batang
5	Batu Sanggan	Bibit Sawit	1000 batang
		Bibit Karet	5000 batang
		Bibit Durian	50 batang
6	Kota Lama	Bibit Sawit	1000 batang
		Bibit Karet	5000 batang
		Bibit Durian	50 batang
7	Aur Kuning	Bibit Sawit	1000 batang
		Bibit Karet	5000 batang
		Bibit Durian	50 batang

Sumber: Kantor Camat Kampar Kiri Hulu Tahun 2015/2016

Dari tabel 1.2 di atas terlihat bahwa pemberdayaan masyarakat dengan jenis pengembangan usaha tani yang mana dalam program ini mendapatkan bibit sawit, karet dan durian untuk 7 desa, dari tiap-tiap desa mendapatkan 1000 batang bibit sawit, 5000 batang bibit karet dan 50 batang bibit durian. Yang mana desa ini harus mengembangkan bibit tersebut untuk membentuk perubahan yang lebih

baik di bidang pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi camat jarang memberikan pedoman atau panduan kepada Desa, Lembaga Desa dan masyarakat. Dan jaranginya pertemuan resmi antara pihak Kecamatan dengan Desa.

Tabel 1.3 : Daftar Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Mengenai Penyediaan Sarana dan Prasarana Untuk Pengembangan Usaha Tani Kecamatan Kampar Kiri Hulu.

No	Desa	Kegiatan	Jumlah/Bibit
1	Gema	Bibit Jagung	30 bungkus
		Bibit Cabe	10 bungkus
2	Tanjung Belit	Bibit Jagung	30 bungkus
		Bibit Cabe	10 bungkus
3	Tanjung Belit Selatan	Bibit Jagung	30 bungkus
		Bibit Cabe	10 bungkus
4	Muara Bio	Bibit Jagung	30 bungkus
		Bibit Cabe	10 bungkus
5	Batu Sanggan	Bibit Jagung	30 bungkus
		Bibit Cabe	10 bungkus

Sumber: Kantor Camat Kampar Kiri Hulu Tahun 2016/2017

Dari tabel 1.3 di atas terlihat bahwa pemberdayaan masyarakat dengan jenis pengembangan usaha tani yang mana dalam program ini mendapatkan bibit jagung dan cabe untuk 5 Desa, yang mana setiap desa mendapatkan bibi jagung sebanyak 30 bungkus sementara bibit cabe sebanyak 10 bungkus. Bibit-bibit ini di berikan langsung oleh pihak Kecamatan kepada Kepala Desa, dan kepala desalah yang menentukan masyarakat seperti apa yang pantas mendapatkan bantuan tersebut dan di bantu oleh ketua RT setempat.

Selanjut untuk melihat kegiatan pemberdayaan masyarakat mengenai pengadaan sarana dan prasarana untuk pengembangan usaha ternak dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.4: Daftar Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Mengenai Penyediaan Sarana dan Prasarana Untuk Pengembangan Usaha Ternak Kecamatan Kampar Kiri Hulu.

No	Desa	Jenis Kegiatan	Jumlah
1	Gema	Pengadaan Sapi	20 ekor
		Pengadaan Kerbau	20 ekor
		Pengadaan Kambing	20 ekor
2	Tanjung Belit	Pengadaan Sapi	20 ekor
		Pengadaan Kerbau	20 ekor
		Pengadaan Kambing	20 ekor
3	Tanjung Beringin	Pengadaan Sapi	20 ekor
		Pengadaan Kerbau	20 ekor
		Pengadaan Kambing	20 ekor
4	Gajah Bertalut	Pengadaan Sapi	20 ekor
		Pengadaan Kerbau	20 ekor
		Pengadaan Kambing	20 ekor
5	Batu Sasak	Pengadaan Sapi	20 ekor
		Pengadaan Kerbau	20 ekor
		Pengadaan Kambing	20 ekor
6	Danau Sentul	Pengadaan Sapi	20 ekor
		Pengadaan Kerbau	20 ekor
		Pengadaan Kambing	20 ekor

Sumber: Kantor Camat Kampar Kiri Hulu Tahun 2015/2016

Dari tabel 1.4 di atas mengenai penyediaan sarana dan prasarana untuk pengembangan usaha ternak di kecamatan Kampar Kiri Hulu, Camat tidak melakukan pengarahan terhadap Desa, Lembaga Desa dan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan di bidang usaha ternak.

Selanjut untuk melihat kegiatan pemberdayaan masyarakat mengenai pengadaan sarana dan prasarana fasilitas umum dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.5 : Daftar Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Mengenai Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum Kecamatan Kampar Kiri Hulu.

Desa	Jenis Kegiatan	Volume
Gema	Pembangunan Mesjid Raya	4 X 7 M
	Pelebaran Jalan	200 X 2 M
Tanjung Belit	Pembukaan Jalan Baru	100 X 3 M
	Pembuatan Jembatan	200 X 2 M

Sumber: Kantor Camat Kmpar Kiri Hulu Tahun 2015/2016

Dari tabel 1.5 di atas di jelaskan bahwa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu akan di adakan kegiatan pemberdayaan masyarakat mengenai penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum seperti pembangunan mesjid, pelebaran jalan pembuatan jembatan dan pembukaan jalan, akan tetapi camat jarang melakukan koordinasi dan musyawarah dengan Desa, Lembaga Desa ataupun masyarakat dalam pengembangan pemberdayaan tersebut, hal ini terbukti ketika pembukaan jalan yang ada di Desa Tanjung Belit.

Namun koordinasi yang dilakukan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar terlihat belum maksimal, dimana masih terdapat gejala dengan Fenomena sebagai berikut:

1. Pihak kecamatan melakukan pertemuan resmi dengan Desa hanya satu kali ketika pembahasan program pemberdayaan masyarakat seperti program untuk pengembangan usaha tani.
2. Koordinasi yang dibangun oleh camat dengan aparatur desa dalam kegiatan pemberdayaan dibidang penyediaan sarana dan prasarana

fasilitas umum tidak begitu baik sehingga kegiatan tidak berjalan sesuai harapan yang ada di Desa Tanjung Belit.

3. Tidak adanya pedoman atau panduan yang diberikan oleh pihak kecamatan kepada pihak Desa sehingga setiap program yang diberikan tidak membuahkan hasil yang memuaskan seperti yang ada pada pengembangan usaha tani.
4. Tidak adanya pengarahan dalam mengadakan pertemuan informal yang diberikan oleh camat kepada aparatur desa, dalam kegiatan pengembangan usaha ternak.

B. Rumusan Masalah

Dalam kehidupan masyarakat desa perlu di perhatikan oleh Camat, karena Camat sebagai koordinator kegiatan pemberdayaan harus bekerja sama dengan kepala desa dan lurah, untuk menciptakan masyarakat yang mandiri melalui kegiatan pemberdayaan ini demi kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan fenomena dan gejala-gejala yang ditemui di lapangan, maka penulis merumuskan sebuah permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

“Bagaimana Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar? “

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan utama melaksanakan kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Tugas Camat dalam Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian:

- a. Secara Teoritis penelitian ini merupakan salah satu bahan pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu pemerintahan.
- b. Secara Praktis, menjadi bahan masukan bagi pemerintahan kecamatan dalam melaksanakan kewenangan yaitu dalam urusan perencanaan pembangunan.
- c. Secara Akademik, dapat menjadi bahan referensi dan juga dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi peneliti lainnya dimasa yang mendatang.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

Bersamaan dengan munculnya Negara sebagai organisasi terbesar yang relative awet dan kokoh dalam kehidupan bermasyarakat. Maka pemerintahan mutlak harus ada untuk membarangnya. Yaitu munculnya keberadaan dua kelompok orang yang memerintah di satu pihak yang diperintah di lain pihak.

Hubungan-hubungan antar yang memerintah dan diperintah itulah yang menjadi objek pemerintahan, karena dalam hubungan-hubungan tersebut akan ditemui berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, karena dalam hubungan-hubungan tersebut akan ditemui berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan.

Menurut Syafiie (2007:4) secara etimologi, pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut dibawah ini:

1. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Yang berarti di dalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.
2. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi perintah. Yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
3. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Kemudian menurut Ndraha (2005:36), Pemerintahan adalah suatu badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang disebut dengan pemerintah adalah proses pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Menurut Rosenthal (dalam Syafiie, 2005:21) Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukan cara kerja kedalam dan keluar struktur dan proses pemerintahan umum.

Kemudian menurut Poelje (dalam Syafiie, 2005:21) Ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya.

Selanjutnya menurut Brasz (dalam Syafiie, 2005:21) Ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara kedalam maupun keluar terhadap warganya.

Ilmu pemerintahan mempelajari pemerintah dari dua sudut, pertama dari sudut bagaimana seharusnya (sehingga dapat diterima oleh yang bersangkutan pada saat dibutuhkan) jadi normatif, ideal dan kedua dari sudut bagaimana senyatanya (pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan apakah ia menerima pelayanan yang diharapkan atau tidak, jadi empirik). Berdasarkan defenisi itu dapat dikonstruksikan ruang lingkup ilmu pemerintahan.

Apabila ditinjau dari segi pemerintah, pemerintah berasal dari kata pemerintah, yang sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsure yaitu: ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. (Syafiie, 2005:20).

Sedangkan konsep ilmu pemerintahan bahwa ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga

pemerintah umum itu disusun dan difungsikan baik secara kedalam maupun keluar terhadap warganya. (Brasz dalam Syafiie, 2005:21).

Menurut Sedarmayanti (2004:35) Pemerintah atau Government adalah lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian atau Negara kota dan sebagainya, sedangkan pemerintahan atau government adalah tidak dari penyelenggaraan pemerintahan.

Berikut ini akan dijelaskan beberapa devenisi tentang ilmu pemerintahan dan pemerintah, sebagai berikut:

Bayu Suryaningrat mengemukakan bahwa disiplin ilmu yang tertua adalah ilmu pemerintahan karena sudah dipelajari sejak sebelum masehi oleh para filosof yaitu Aristoteles (dalam Syafie dan Andi Azikin, 2007:10).

Selanjutnya Widjaja (2005:44) mengatakan bahwa fungsi pemerintahan adalah pengertian unsur pemerintahan di luar fungsi lembaga tertinggi dan tinggi Negara lainnya (fungsi eksekutif) yang dilakukan presiden, dengan demikian unsur pemerintahan ini tidak mencampuri fungsi legeslatif dan fungsi yudikatif.

Pemerintahan merupakan suatu organisasi formal yang terbentuk berdasarkan ketentuan yang terdapat pada setiap Negara begitu juga di Indonesia. Pemerintah terbentuk dengan tujuan dasar melakukan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta menjalankan fungsi-fungsi yang dimiliki guna tercapai tujuan yang telah diciptakan.

Sedangkan menurut Ndraha (2003:5), mengatakan bahwa pemerintahan adalah suatu sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan tertentu yang diperintah akan jasa publik dan pelayanan sipil,

sedangkan pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan kewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap anggota melalui hubungan pemerintah.

Dari penjelasan diatas jelas bahwa fungsi hakiki pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintah terbagi menjadi 3 (tiga) fungsi yaitu:

1. Fungsi Pelayanan.
2. Fungsi Pemberdayaan.
3. Fungsi Pembangunan.

Selanjutnya dalam buku yang sama Ndraha (2003:6) pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan kewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah.

Seperti yang dikemukakan oleh Sedarmayanti (2004:35) pemerintah (*government*) adalah lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian atau Negara kota sebagainya.

Ndraha (2003:24) mendefenisikan pemerintahan (*Government*) adalah Sub Kultur Kekuasaan (SKK) dan hanyalah salah satu diantara tiga sub kultur masyarakat, tanpa SKE dan SKP yang terjadi adalah unjuk kekuasaan, pemaksaan, aksi kekerasan, kesewenang-wenangan, dan penindasan SKK terhadap dua subkultur lainnya.

Kemudian menurut C.F. Strong (dalam Syafie dan Andi Azikin, 2007:8) pemerintah dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara.

Kemudian pada buku yang lain Ndraha (2005:36) mendefinisikan pemerintahan merupakan proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Dalam ilmu pemerintahan, pemerintahan juga merupakan kegiatan lembaga publik dan menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara, dan menjalankan pemerintahan disebut pemerintah, secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (1997:3) antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dan mencegah terjadinya keributan antara masyarakat, menjamin perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Peraturan yang adil pada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang tidak dikerjakan oleh lembaga non pemerintah, atau akan lebih baik dikerjakan oleh pemerintah.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

2. **Konsep Otonomi Daerah**

Pada tanggal 1 januari 2001 yang lalu, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi telah menyatakan dimulainya pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perubahan yang terjadi pada dasarnya menyangkut dua hal pokok, yaitu:

1. Pemerintah daerah diberi kewenangan lebih besar dalam melakukan pengelolaan pembangunan (Desentralisasi Pembangunan).
2. Pemerintah daerah diberi sumber keuangan baru dan kewenangan pengelolaan keuangan yang lebih besar (Desentralisasi Fiskal).

Perkataan otonomi berasal dari bahasa Yunani, *Outonomous*, yang berarti pengaturan sendiri atau pemerintahan sendiri. Menurut *Encyclopedia of Social Science*, pengertian otonomi menyangkut dua hal pokok yaitu: kewenangan untuk membuat hukum sendiri (*own laws*) dan kebebasan untuk mengatur pemerintahan sendiri (*self government*). Berdasarkan pengertian tersebut, maka otonomi daerah pada hakikatnya adalah hak atau wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri bagi suatu daerah otonom, (Sarundajang dalam Sjafrizal, 2014;106). Hak atau wewenang tersebut meliputi pengaturan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Menurut Hidayat Syarief (dalam Sjafrizal, 2014;106) Pada dasarnya ada tiga alasan pokok mengapa diperlukan otonom daerah tersebut:

1. *Political Equality* yaitu guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada tingkat daerah. Hal ini penting artinya untuk meningkatkan demokratisasi dalam pengelolaan negara.
2. *Local Accountability* yaitu meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan hak dan aspirasi masyarakat di daerah. Hal ini sangat penting artinya dalam rangka

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial dimasing-masing daerah.

3. *Local Responsiveness* yaitu meningkatkan respon pemerintah daerah terhadap masalah-masalah sosial ekonomi yang terjadi didaerahnya. Unsur ini sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan sosial didaerah.

Menurut Simanjuntak (dalam Sjafrizal, 2014;108) mengidentifikasi pula tiga unsur penting dalam konsep otonomi daerah:

- a. Adanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berwenang menentukan pelayanan jasa apa saja yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan pengeluaran dana untuk itu.
- b. Adanya kebebasan dan keleluasan Pemerintah Daerah untuk menetapkan bentuk organisasi pemerintahan yang diperlukan dan merekrut sendiri pegawai sesuai kebutuhan daerah.
- c. Adanya sumber-sumber pendapatan yang dikuasai oleh pemerintah Daerah, tetapi ini tidak berarti bahwa daerah tidak memerlukan subsidi dari Pemerintah pusat untuk menggerakkan kegiatan pembangunan didaerahnya.

3. Konsep Kebijakan

Di Indonesia menggunakan istilah “ *Kebijaksanaan dan Kebijakan* ” dari terjemahan *Policy* yang dikatakan dengan keputusan pemerintah. Hal ini diilhami oleh kata yang mempunyai arti kewenangan dan kekuasaan yang dipegang oleh pemerintah, bertujuan untuk mengarahkan dan bertanggung jawab melayani

umum. Pandangan ini dijelaskan dengan pengertian “*Publik*” yang berarti pemerintah, masyarakat dan umum. Perbedaan Kebijaksanaan dengan Kebijakan, yang membedakan istilah “*Policy*” sebagai keputusan pemerintahan yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat, dengan istilah “*Discretion*” yang artinya keputusan yang bersifat kasuistis untuk satu hal.

Dunn (2003:22) mengemukakan proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktifitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan digambarkan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur dalam urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, abodsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

Selanjutny Menurut Soeharto (2010:7) Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Menurut Eaulau dan Prewit (dalam Suharto, 2010:7) Kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang-ulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan).

4. Teori Tugas

Menurut Nugroho (2004:3) Tugas adalah konsekuensi dari serangkaian tindakan berdasarkan peranan jabatan maupun kedudukan untuk mencapai nilai-nilai dan arena itu merupakan penyelesaian terhadap suatu masalah. Tugas melibatkan peranan dalam mengambil tindakan yang mengarah aksi dari kebijakan (policy action) yaitu suatu gerakan atau serangkaian kegiatan yang dituntun oleh alternative yang dirancang untuk mencapai hasil di masa depan yang

bernilai, kinerja kebijakan (policy performance) adalah merupakan derajat dimana hasil kebijakan yang member kontribusi terhadap pencapaian nilai-nilai.

Sigian (2003:126) pelaksanaan tugas adalah “suatu kegiatan yang diarahkan kepada keberhasilan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ada”. Selanjutnya mengenai pelaksanaan tugas adalah merupakan aktifitas yang dilaksanakan para anggota organisasi di dalam bidang tugas yang di berikan kepadanya.

5. Konsep Kepemimpinan

Konsep Kepemimpinan pada dasarnya berasal dari kata “pimpin” yang artinya bombing atau tuntun. Dari kata “pimpin” melahirkan kata kerja “memimpin” yang artinya membimbing atau tuntun dan kata benda “pemimpin” yaitu orang yang berfungsi memimpin, atau orang yang membimbing atau tuntun. Sedangkan kepemimpinan yaitu kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan. Kepemimpinan dalam birokrasi merupakan suatu yang sangat menentukan berhasil tidaknya birokrasi. Karena pemimpin yang bertanggungjawab untuk mengkoordinir dan mengorganisir sumber daya birokrasi sehingga bisa menjadi satu kesatuan yang utuh dan selaras satu sama lain.

Defenisi kepemimpinan telah dikemukakan oleh berbagai literature kepemimpinana, namun defenisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut,berbeda-beda tergantung dari perspektif unit analisis masing-masing. Untuk memudahkan memahami pendapat para ahli tersebut, maka akan dikemukakan pendapat sebagai berikut:

Dari berbagai defenisi diatas, maka dapat dijadikan dasar untuk menambah defenisi kepemimpinan adalah (cara atau teknik=gaya) yang digunakan pemimpin dalam mempengaruhi pengikut atau bawahannya dalam melakukan kerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Dengan demikian, seorang pemimpin mendapat kedudukan yang lebih tinggi dari pengikut atau bawahan/staf, memiliki kekuasaan, fasilitas maupun keuntungan yang melekat pada kedudukannya sebagai pemimpin. Namun, pemimpin mempunyai kewajiban untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang diinginkan kelompok atau masyarakat.

Menurut anggapan Ali ((2013:21) kepemimpinan adalah suatu proses, dimana pemimpin mempengaruhi pengikutnya untuk memberikan keyakinan terhadap keinginan organisasi yang akan dicapai sebagai suatu tujuan bersama.

Oleh karena itu, kepemimpinan sangat diperlukan bila suatu birokrasi ingin sukses. Terlebih lagi pegawai-pegawai yang baik, selalu ingin bagaimana mereka dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan birokrasi, untuk membangkitkan gairah para pegawai memerlukan kepemimpinan sebagai dasar motivasi eksternal untuk menjaga tujuan-tujuan mereka tetap harmonis dengan tujuan birokrasi.

6. Konsep Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Sedangkan pembangunan pada hakekatnya adalah upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang menjadi cita-cita

bangsa Indonesia. Dengan demikian, berkaitan dengan konsep perencanaan pembangunan akan dijelaskan beberapa pengertian tentang perencanaan pembangunan menurut para ahli sebagai berikut. Secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi Negara atau daerah yang bersangkutan. (Sjafrizal, 2014:24)

Menurut Riyadi dan Bratakusumah (2004:7) perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktifitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun nonfisik (mental dan Spritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

Menurut Arthur W.Lewis (dalam Sjafrizal, 2014:24-25) mendefenisikan perencanaan pembangunan sebagai suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih proaktif.

Perencanaan pembangunan pada dasarnya adalah merupakan pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa (pemerintah) pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu.

Selanjutnya menurut Kuncoro (2004:3) perencanaan pembangunan daerah dapat dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumber daya-sumber daya publik yang tersedia didaerah tersebut dan untuk memperbaiki

kapasitas sector swasta dalam menciptakan nilai sumber daya-sumber daya swasta secara bertanggung jawab.

Khusus untuk meluruskan pemahaman dan pelaksanaan perencanaan pembangunan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 perencanaan pembangunan nasional sebagai berikut; “Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah suatu kesatuan tata-cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah”.

Dari beberapa definisi dan pengertian perencanaan pembangunan di atas terlihat dengan jelas bahwa komponen utama dari perencanaan pembangunan pada dasarnya adalah:

1. Merupakan usaha pemerintah secara terencana dan sistematis untuk mengendalikan dan mengatur proses pembangunan.
2. Mencakup periode jangka panjang, menengah dan tahunan.
3. Menyangkut dengan variabel-variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Mempunyai suatu sasaran pembangunan yang jelas sesuai dengan keinginan masyarakat.

Perencanaan pembangunan dapat diklasifikasikan atas tiga jenis, tergantung dari sifatnya masing-masing, yaitu:

1. Perencanaan Jangka Panjang, mencakup waktu 20 tahun.
2. Perencanaan Jangka Menengah, mencakup waktu 5 Tahun.
3. Perencanaan Jangka Pendek, mencakup hanya waktu 1 Tahun.

Untuk dapat lebih terjaminnya pelaksanaan suatu perencanaan pembangunan diperlukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan tersebut antara lain adalah:

- a) Perencanaan harus berorientasi pada pelaksanaan;
- b) Perencanaan tersebut harus dapat selalu disesuaikan dengan perubahan kondisi sosial ekonomi;
- c) Menjaga keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran;
- d) Mengembangkan kapasitas dan kualitas tenaga rencana;
- e) Melakukan optimalisasi peran serta masyarakat.

Secara umum terdapat empat tahap dalam proses pembangunan yang sekaligus juga menggambarkan tugas pokok badan perencanaan pembangunan. *Tahap Pertama* adalah penyusunan rencana, *Tahap Kedua*, penetapan rencana, *Tahap Ketiga*, Pengendalian Pelaksana rencana, dan *Tahap Keempat*, evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana. Keempat tahap ini berkaitan satu sama lainnya sehingga perlu dijaga konsistensi antara satu sama lainnya. (Sjafrizal, 2014:38).

Untuk lebih jelasnya, berikut ini diberikan penjelasan lebih lanjut dari masing-masing tahapan perencanaan pembangunan tersebut:

1. Tahapan Penyusunan Rencana

Menyusun naskah atau rancangan rencana pembangunan dilakukan dengan menggunakan pendekatan Perencanaan Partisipatif, yaitu naskah rencana disusun melalui penjaringan aspirasi dan keinginan masyarakat tentang visi dan misi serta arah pembangunan.

2. Tahap Penetapan Rencana

Setelah penyusunan rencana disusun, maka langkah berikutnya adalah menetapkan prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan perlu

dilakukan agar tujuan dan sasaran pembangunan dapat dilakukan dengan kondisi dana yang terbatas.

3. Tahapan Pengendalian Pelaksana Rencana

Sasaran utama pengendalian ini adalah untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan semula. Termasuk dalam pengendalian ini adalah melakukan observasi lapangan dan menanggulangi permasalahan dan kendala yang dihadapi.

4. Tahap Evaluasi Keberhasilan Pelaksanaan Rencana

Melakukan evaluasi terhadap kinerja dari kegiatan pembangunan tersebut. Sasaran utama kegiatan evaluasi ini adalah untuk mengetahui apakah kegiatan dan objek pembangunan yang telah selesai dilaksanakan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Hasil evaluasi ini sangat penting sebagai masukan untuk menyusun rencana pembangunan dimasa mendatang.

7. Konsep Koordinasi

Dalam sebuah organisasi setiap pemimpin perlu untuk mengkoordinasikan kegiatan kepada anggota organisasi yang diberikan dalam menyelesaikan tugas. Dalam adanya penyampaian informasi yang jelas, pengkomunikasian yang tepat, dan pembagian pekerjaan kepada bawahan oleh manajer maka setiap individu bawahan akan mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan wewenang yang diterima. Tanpa adanya koordinasi setiap pekerjaan dari individu karyawan maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai.

Menurut Handoko (2003: 195) Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif.

Menurut Hasibuan (2006: 85) berpendapat bahwa koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.

Selanjutnya koordinasi menurut Daryanto (2013: 50) adalah proses untuk menyatukan, mengkomunikasikan seluruh kegiatan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Menurut Manullang (2008:72) koordinasi adalah usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi agar tertuju untuk memberikan sumbangan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan dengan adanya koordinasi akan terdapat keselarasan aktivitas diantara unit-unit organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

Menurut Manullang (2008:72-73) koordinasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Empat cara utama dalam usaha memelihara koordinasi adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan pertemuan resmi antara unsur-unsur atau unit yang harus dikoordinasikan. Dalam pertemuan seperti ini dibahas dan diadakan pertukaran pikiran dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan tujuan

mereka akan berjalan seiring dan bergandengan dalam mencapai suatu tujuan.

2. Mengangkat seseorang, suatu tim atau panitia koordinator yang khusus bertugas melakukan kegiatan-kegiatan koordinasi, seperti member penjelasan atau bimbingan kepada unit-unit yang dikoordinasikan.
3. Membuat buku pedoman yang berisi penjelasan tugas dari masing-masing unit. Buku pedoman seperti itu diberikan kepada setiap unit untuk dipedomani dalam pelaksanaan tugas masing-masing.
4. Mengadakan pertemuan informal, pimpinan atau atasan mengadakan pertemuan-pertemuan dengan bawahannya dalam rangka pemberian bimbingan, konsultasi, dan pengarahan.

Melakukan kegiatan koordinasi dengan berbagai cara seperti diatas sangat perlu untuk menghindari terjadinya konflik, mengurangi duplikasi tugas, meniadakan pengangguran, melenyapkan kepentingan unit sendiri dan memperkuat kerja sama. Dengan setiap koordinasi diharapkan akan tercipta suasana kerja sama, kesatuan tindakan dan kesatuan tujuan akhir.

Terlihat dari penjelasan diatas koordinasi merupakan suatu usaha untuk mengarahkan anggota organisasi kepada satu tujuan yang telah ditentukan dengan kegiatan berupa komunikasi. Hasibuan (2006: 86) berpendapat koordinasi penting dalam suatu organisasi, yaitu:

- a. Untuk mencegah terjadinya kekacauan, pencecokan, dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan.

- b. Agar orang-orang dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk pencapaian tujuan organisasi.
- c. Agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai tujuan.
- d. Supaya semua unsur manajemen dan pekerjaan masing-masing individu pegawai harus membantu tercapainya tujuan organisasi.
- e. Supaya semua tugas, kegiatan, dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan.

Selanjutnya mengenai pelaksanaan koordinasi yang baik menurut Hasibuan (2006: 88) perlu cara-cara melakukan koordinasi meliputi:

1. Memberikan keterangan langsung secara bersahabat. Keterangan mengenai pekerjaan saja tidak cukup, karena tindakan-tindakan yang tepat harus diambil untuk menciptakan dan menghasilkan koordinasi yang baik. (informal)
2. Mengusahakan agar pengetahuan dan penerimaan tujuan yang akan dicapai oleh anggota, tidak menurut masing-masing individu anggota dengan tujuannya sendiri. Tujuan itu adalah tujuan bersama. (sinkronisasi)
3. Mendorong para anggota, untuk bertukar pikiran, mengemukakan ide, saran-saran dan lain sebagainya.
4. Mendorong para anggota untuk berpartisipasi dalam tingkat perumusan dan penciptaan sasaran. (berpartisipasi)
5. Membina human relation yang baik antara sesama karyawan. (Human Relation)

6. Sering melakukan komunikasi informal dengan para bawahan.

Berdasarkan pengertian diatas jelaslah bahwa koordinasi adalah tindakan seorang pemimpin untuk mengusahakan terjadinya keselarasan, antara tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang satu dengan bagian yang lain. Dengan koordinasi ini diartikan sebagai suatu usaha kearah keselarasan kerja antara anggota organisasi sehingga tidak terjadi kesimpang siuran, tumpang tindih. Hal ini berarti pekerjaan akan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Khususnya pada kegiatan pemberdayaan masyarakat yang mana pimpinan sebagai koordinator dengan melihat bagaimana cara untuk melakukan koordinasi yang mana koordinator wajib melakukan pemberian informasi kegiatan dalam rangka usaha pemberdayaan masyarakat, menyinkronkan kegiatan anggota organisasi terhadap tujuan yang ingin dicapai, mengikut sertakan anggota organisasi dalam memberikan ide, membin hubungan dengan anggota dan antar anggota organisasi dengan komunikasi yang dilakukan pimpinan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan aktivitas di dalam suatu perusahaan atau organisasi agar mempunyai keselarasan di dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Koordinasi Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai proses kesepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur (yang terlibat dalam proses) pemerintahan (plat merah, palat kuning dan plat hitam) yang berbeda-beda pada dimensi waktu, tempat, komponen, fungsi, dan kepentingan, antar pemerintah dengan yang diperintah, sehingga disatu sisi semua kegiatan kedua

belah pihak terarah pada tujuan pemerintahan yang telah ditetapkan bersama, dan disisi lain keberhasilan pihak yang satu tidak dirusak oleh pihak lain.

Beberapa ahli berpendapat bahwa koordinasi itu merupakan fungsi dari manajemen. G.R. Terry berpendapat bahwa masalah koordinasi merupakan yang akan tercapai dengan sendirinya, jika POAC diterapkan dengan baik. Para ahli sependapat bahwa koordinasi itu penting supaya semua tindakan ditunjukkan serta memberikan sumbangannya kepada tujuan umum perusahaan.

a. Tipe-tipe Koordinasi

1. Koordinasi Vertikal adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan, yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada dibawah wewenang dan tanggung jawabnya.
2. Koordinasi Horizontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi yang setingkat.

b. Tujuan Koordinasi

1. Untuk mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikiran kearah tercapainya sasaran organisasi atau perusahaan.
2. Untuk menjerumuskan keterampilan spesialis kearah sasaran organisasi atau perusahaan.
3. Untuk menghindari kekosongan dan tumpang tindih pekerjaan.
4. Untuk menghindari kekacauan dan penyimpangan tugas dan sasaran.

5. Untuk mengentregasikan tindakan dan pemanfaatan 6M kearah sasaran organisasi atau perusahaan.

c. Syarat-syarat Koordinasi

1. Sane of cooperation (perasaan untuk bekerja sama), ini harus dilihat dari sudut bagian bidang pekerjaan, bukan orang perorangan.
2. Ivalry, dalam perusahaan-perusahaan besar sering diadakan persaingan antar bagian-bagian. Agar bagian-bagian ini berlomba-lomba untuk mencapai kemajuan.
3. Team Spirit, artinya satu sama lain pada setiap bagian harus saling menghargai.
4. Esprit de Corps, artinya bagian-bagian yang di ikut sertakan atau dihargai, umumnya akan menambah kegiatan yang semangat.

d. Cara-cara mengadakan Koordinasi

Menurut Hasibuan (2006:88) cara mengadakan koordinasi yang baik adalah sebagai berikut:

1. Memberikan keterangan langsung dan secara bersahabat. Keterangan mengenai pekerjaan saja tidak cukup, karena tindakan-tindakan yang tepat harus di ambil untuk menciptakan dan menghasilkan koordinasi yang baik.
2. Mengusahakan agar pengetahuan dan penerimaan tujuan yang akan dicapai oleh anggota, tindakan menurut masing-masing individu anggota dengan tujuannya sendiri-sendiri. Tujuan ini adalah tujuan bersama.
3. Mendorong para anggota untuk bertukar pikiran, mengemukakan ide, saran-saran dan lain sebagainya.

4. Mendorong para anggota untuk berpartisipasi dalam tingkat perumusan dan menciptakan sasaran.
5. Membina human relation yang baik antara sesama karyawan.
6. Manajer sering melakukan komunikasi informal dengan para bawahan.

Menurut Djamin (2005:79) manfaat koordinasi adalah sebagai berikut:

1. Untuk mencegah terjadinya kekacauan, percocokan dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan.
2. Agar orang-orang dan pekerjaannya diselaraskan serta disarankan untuk mencapai tujuan organisasi.
3. Agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai tujuan.
4. Supaya semua unsur manajemen (6M) dan pekerjaan masing-masing individu pegawai harus membantu tercapainya tujuan organisasi.
5. Supaya semua tugas, kegiatan dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang di inginkan.

Dalam koordinasi, setiap unit lembaga mengadakan hubungan untuk saling tukar pikiran mengenai kegiatan dan hasil yang telah dicapai pada saat tertentu, serta saling mengungkapkan masalah-masalah yang dihadapi dan mencari jalan pemecahnya, sekaligus saling membantu memecahkan masalah. Dengan demikian, setiap pekerjaan dapat dikerjakan dengan lancar terarah pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

8. Konsep Pemberdayaan Masyarakat.

Linton (dalam Soekanto, 2006:22) mendefenisikan masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.

Pemberdayaan masyarakat menurut Widjaja (2003:169) ialah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga

masyarakat dapat mewujudkan jati diri, secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial agama dan budaya. Dari pengertian diatas dapat dilihat penjelasan mengenai pemberdayaan merupakan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan mereka.

Selanjutnya Sedarmayanti (2004:116) mengemukakan pemberdayaan adalah pengembangan potensi ekonomi rakyat, hakekat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya, sehinga terpelihara tatanan nilai budaya setempat. Masyarakat yang mampu dikatakan berdaya jika mereka memiliki kekuatan fisik dan mental yang kuat dan terdidik. Bukan itu saja yang menjadi sumber keberdayaan bagi masyarakat, nilai kekeluargaan dan gotong royong juga menjadi poin didalam membentuk keberdayaan masyarakat. Masyarakat yang berdaya akan membentuk keberdayaan disegala aspek kehidupan, sehingga pada akhirnya masyarakat akan lebih mandiri. Ini yang menjadi titik akhir dari pemberdayaan masyarakat.

Menurut Soetomo (2011:69) pemberdayaan masyarakat adalah sebuah pendekatan yang memberikan kesempatan, wewenang yang lebih besar kepada masyarakat lokal untuk mengelola proses pembangunannya.

Dengan diadakannya kegiatan pemberdayaan masyarakat ini maka akan dapat mewujudkan masyarakat yang mandiri, yang sudah bisa mengerti akan pentingnya pemberdayaan masyarakat dan bisa mewujudkan pembangunan didaerah. Jadi dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat yang mana tindakan yang dilakukan dan kesejahteraan mereka.

B. Penelitian Terdahulu

Berikut dapat dijelaskan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, penelitian sebelumnya diteliti oleh:

1. Awan Saputra NPM 107310171 dengan judul Peranan camat dalam mengkoordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di kecamatan bangko pusako Kabupaten Rokan Hilir. Dengan fenomena:
 - a. Terindikasi koordinasi yang dilakukan pihak Kecamatan dengan instansi vertikal seperti penghulu belum berjalan maksimal, hal ini terlihat dari beberapa pasar rakyat yang belum terpelihara dengan baik.
 - b. Koordinasi yang dilakukan oleh pihak Kecamatan dengan instansi perangkat daerah yaitu Dinas Pasar dalam pemeliharaan pasar rakyat seperti pemeliharaan los tempat berjualan di pinggir jalan. Dan WC umum pasar rakyat yang telah rusak tidak segera dilakukan perbaikan.
 - c. Belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kecamatan kepada masyarakat dalam rangka menjaga prasarana dan fasilitas pelayanan umum sehingga kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam menjaga pasar rakyat yang telah disediakan pemerintah untuk kepentingan bersama.
2. Sutarno NPM 097310332 dengan judul Peranan Camat dalam mengkoordinasikan pembangunan fisik di Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir. dengan fenomena:
 - a. Adanya penimbunan jalan kelompok tani di kepenghuluan Sungai Sialang Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir,

pembangunan ini dilaksanakan oleh Kecamatan Batu Hampar melalui hasil MUSREMBANG dari anggaran dana APBD tahun 2012.

- b. Pembangunan penimbunan jalan kelompok tani ini dilaksanakan di RT.05 parit 4 dengan luas 4 m x 1500 m untuk menghubungkan dari jalan lintas kebun-kebun masyarakat.
3. Boy Satria NPM 107310395 dengan judul Peranan Camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir. dengan fenomena:
 - a. Terindikasi belum terlaksananya pertemuan resmi antara Camat dengan unsur-unsur atau unit-unit yang terkait sebagai bentuk koordinasi dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir.
 - b. Adanya indikasi bahwa Camat Kemuning masih jarang mengadakan pertemuan-pertemuan informal dalam rangka memberikan bimbingan, konsultasi dan pengarahan, misalnya dengan cara mengunjungi langsung pihak pemerintah desa/kelurahan untuk memantau kondisi prasarana dan fasilitas pelayanan umum di masing-masing Desa di kecamatan Kemuning.

Sedangkan penelitian ini dengan judul Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar dengan Fenomena sebagai berikut:

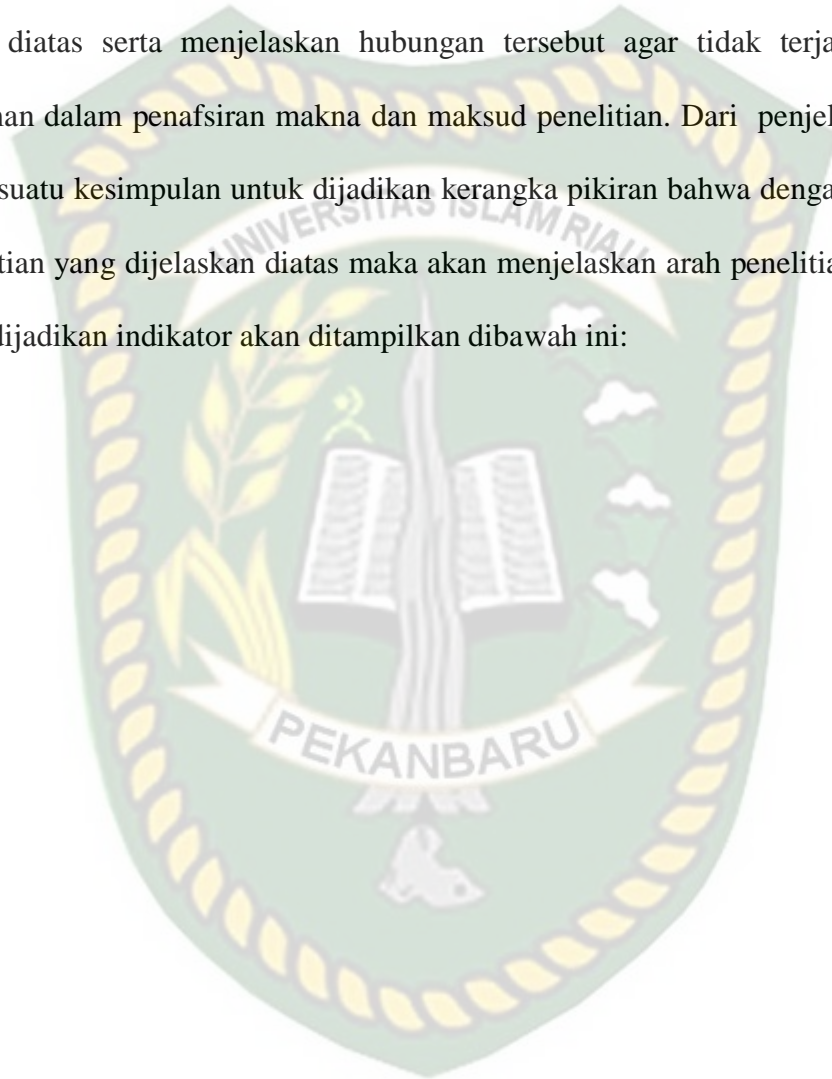
- a. Pihak kecamatan melakukan pertemuan resmi dengan Desa hanya satu kali ketika pembahasan program pemberdayaan masyarakat seperti program untuk pengembangan usaha tani.
- b. Koordinasi yang dibangun oleh camat dengan aparatur desa dalam kegiatan pemberdayaan dibidang penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum tidak begitu baik sehingga kegiatan tidak berjalan sesuai harapan seperti yang ada di Desa Tanjung Belit.
- c. Tidak adanya pedoman atau panduan yang diberikan oleh pihak kecamatan kepada pihak Desa sehingga setiap program yang diberikan tidak membuahkan hasil yang memuaskan seperti yang ada pada pengembangan usaha tani.
- d. Tidak adanya pengarahan dalam mengadakan pertemuan informal yang diberikan oleh camat kepada aparatur desa, dalam kegiatan pengembangan usaha ternak

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikiran adalah untuk membentuk, menjelaskan pemikiran dan konsep dalam menganalisa dan memecahkan masalah yang dihadapi sehubungan dengan penelitian ini, dengan memaparkan keterkaitan antara variabel penelitian dengan indikator-indikator tertentu, berdasarkan konsep maupun teori-teori yang dianggap relevan.

Berangkat dari pedoman pada variabel penelitian “Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Kamp

Kiri Hulu Kabupaten Kampar”. Kemudian mengacu kepada telaah pustaka yang dijadikan indikator penelitian permasalahan yang dihadapi oleh Camat dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan, seperti yang penulis paparkan sebelumnya, maka penulis menjelaskan hubungan dan saling keterkaitan diantara unsur diatas serta menjelaskan hubungan tersebut agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam penafsiran makna dan maksud penelitian. Dari penjelasan diatas dapat suatu kesimpulan untuk dijadikan kerangka pikiran bahwa dengan indikator penelitian yang dijelaskan diatas maka akan menjelaskan arah penelitian ini, teori yang dijadikan indikator akan ditampilkan dibawah ini:

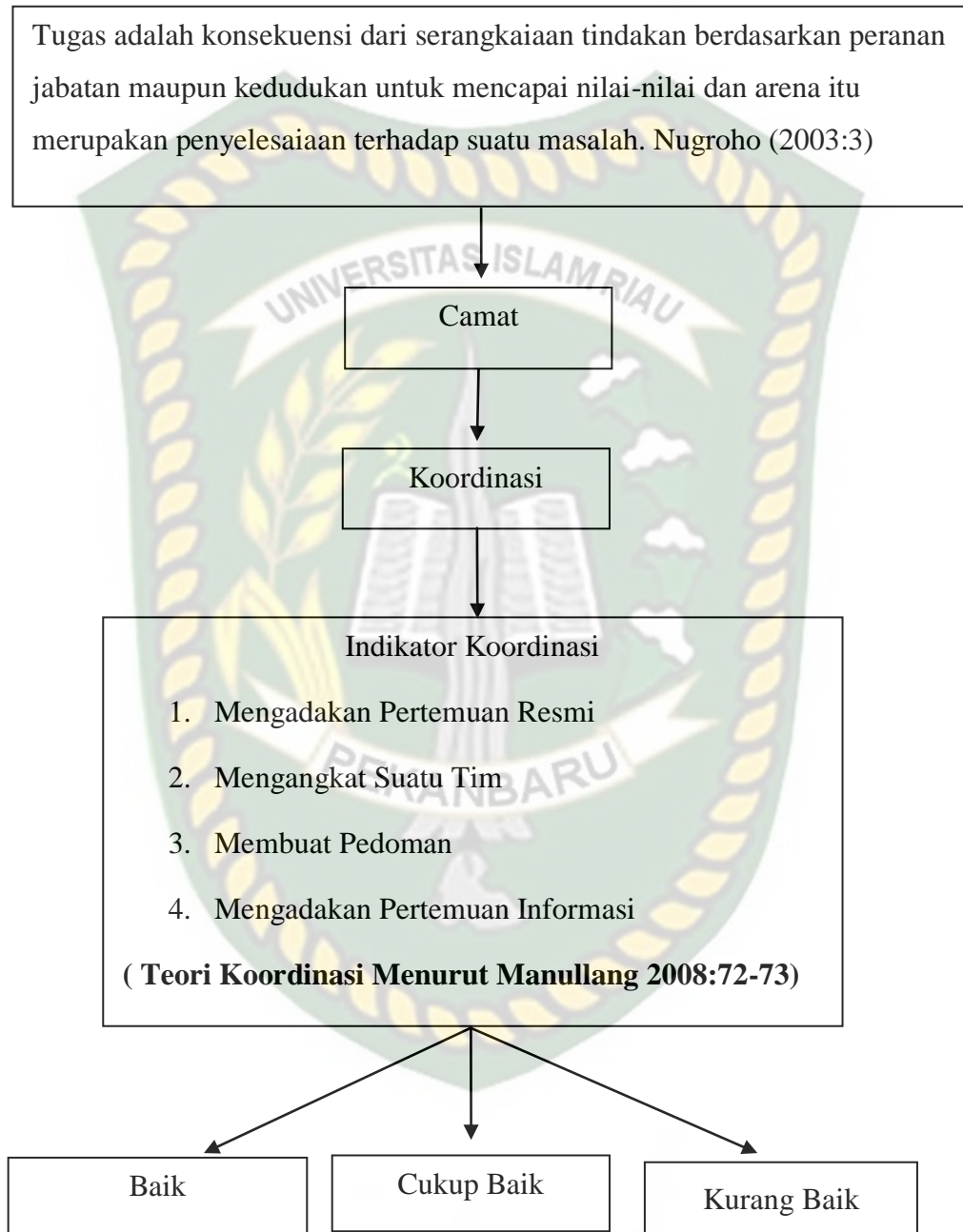


Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Gambar 11.1

Kerangka Pikir Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar



Sumber : Modifikasi penelitian, 2017

D. Konsep Operasional

Untuk memperjelas konsep teoritis yang telah dicantumkan dan memperjelas pengertian, maka penulis mengoperasionalkan konsep tersebut untuk mempermudah pemahaman dan penulisan ini. Beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini baik variabel maupun indikator yakni sebagai berikut:

1. Kecamatan Kampar Kiri Hulu merupakan salah satu Kecamatan yang termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Kampar.
2. Camat merupakan pimpinan kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten atau kota. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah Kecamatan.
3. Koordinasi adalah suatu usaha penyelarasan dari bagian atau unit-unit yang satu dengan lainnya dalam berbagai kegiatan sebagai usaha mencapai tujuan organisasi.
4. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya.
5. Mengadakan pertemuan resmi antar unsur-unsur atau unit-unit yang harus dikoordinasikan. Dalam pertemuan seperti ini, dibahas dan diadakan pertukaran pikiran dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan tujuan mereka akan berjalan seiring dan bergandengan dalam mencapai suatu tujuan.

6. Mengangkat seseorang, suatu tim atau panitia koordinator yang khusus bertugas melakukan kegiatan-kegiatan koordinasi, seperti memberi penjelasan atau bimbingan kepada unit-unit yang dikoordinasikan.
7. Membuat buku pedoman yang berisi penjelasan tugas dari masing-masing unit. Buku pedoman seperti itu diberikan kepada setiap unit untuk di pedomani dalam pelaksanaan tugas masing-masing.
8. Pimpinan atau atasan mengadakan pertemuan-pertemuan informal dengan bawahannya dalam rangka pemberian bimbingan, konsultasi dan pengarahan.

E. Operasional Variabel.

Tabel II.1: Operasional Variabel Tentang Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Ukuran
1	2	3	4	5
Tugas adalah konsekuensi dari serangkaian tindakan berdasarkan peranan jabatan maupun kedudukan untuk mencapai nilai-nilai dan arena itu merupakan penyelesaian terhadap suatu masalah. Nugroho (2004:3)	Koordinasi	a. Mengadakan Pertemuan Resmi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan Rapat atau Musyawarah 2. Pertemuan melibatkan instansi terkait 3. Adanya kerjasama antar pihak 	Nominal
		b. Mengangkat Suatu Tim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi bimbingan 2. Memberikan penjelasan secara rinci 3. Mensosialisasikan 	Nominal
		c. Membuat buku pedoman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan penjelasan mengenai kegiatan pemberdayaan. 	Nominal

1	2	3	4	5
		d. Mengadakan Pertemuan Informal	2. Menentukan arah kebijakan 3. Menjelaskan secara tertulis 1. Membahas langkah-langkah yang akan dilaksanakan 2. Memberikan pengarahan 3. Memberikan solusi	Nominal

F. Teknik Pengukuran.

Dalam menjawab tujuan penelitian tentang Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar, maka di operasionalkan konsep dan pengukuran dari indikator yang digunakan. Pengukuran terhadap pelayanan variabel dan indikator dalam penelitian ini di klasifikasikan dalam 3 kategori yaitu baik, cukup dan kurang baik.

Variabel koordinasi, dengan indikator Mengadakan Pertemuan Resmi, Mengangkat Suatu Tim, Membuat Buku Pedoman dan Mengadakan Pertemuan Informal. Dengan demikian kategori penilaian responden terhadap koordinasi dalam pembangunan adalah sebagai berikut:

Baik : Apabila Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar yang ditetapkan berada dalam kategori 67%.

Cukup Baik : Apabila Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar ditetapkan berada pada kategori 34%-66%.

Kurang Baik : Apabila Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar di tetapkan berada pada kategori 33%.

Kemudian untuk pengukuran masing-masing indikator Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar tersebut sebagai berikut:

1. Adanya pertemuan secara formal dalam melakukan upaya mengkoordinasikan program pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini camat mengadakan pertemuan dengan kepala desa, lurah, pihak-pihak yang berkepentingan dan tokoh masyarakat dengan kategori sebagai berikut:

Baik : Jika rata-rata persentase hasil penelitian terhadap indikator Hirarki manajerial yang ditetapkan berada pada kategori >67-100%

Cukup Baik : Jika rata-rata persentase hasil pelitian terhadap indikator Hirarki Manajerial yang diterapkan berada pada kategori > 34-66%

Kurang Baik : Jika rata-rata persentase hasil penelitian terhadap indikator Hirarki Manajerial yang diterapkan berada pada kategori > 1-33%

2. Mengangkat Suatu Tim dikategorikan.

Baik : Jika rata-rata persentase hasil penelitian terhadap indikator aturan dan prosedur yang diterapkan berada pada kategori > 67-100%

Cukup Baik : Jika rata-rata persentase hasil penelitian terhadap indikator aturan dan prosedur yang diterapkan berada pada kategori > 34-66%

Kurang Baik : Jika rata-rata persentase hasil penelitian terhadap indikator aturan dan prosedur yang ditetapkan berada pada kategori > 1-33%

3. Membuat pedoman tata kerja, memberikan acuan lisan ataupun tulisan oleh Camat Kampar Kiri Hulu dalam program pemberdayaan.

Baik : Jika rata-rata persentase hasil penelitian terhadap indikator Rencana dan Penetapan Tujuan yang ditetapkan berada pada kategori > 67-100%

Cukup Baik : Jika rata-rata hasil penelitian terhadap indikator Aturan dan Prosedur yang diterapkan berada pada kategori > 34-66%

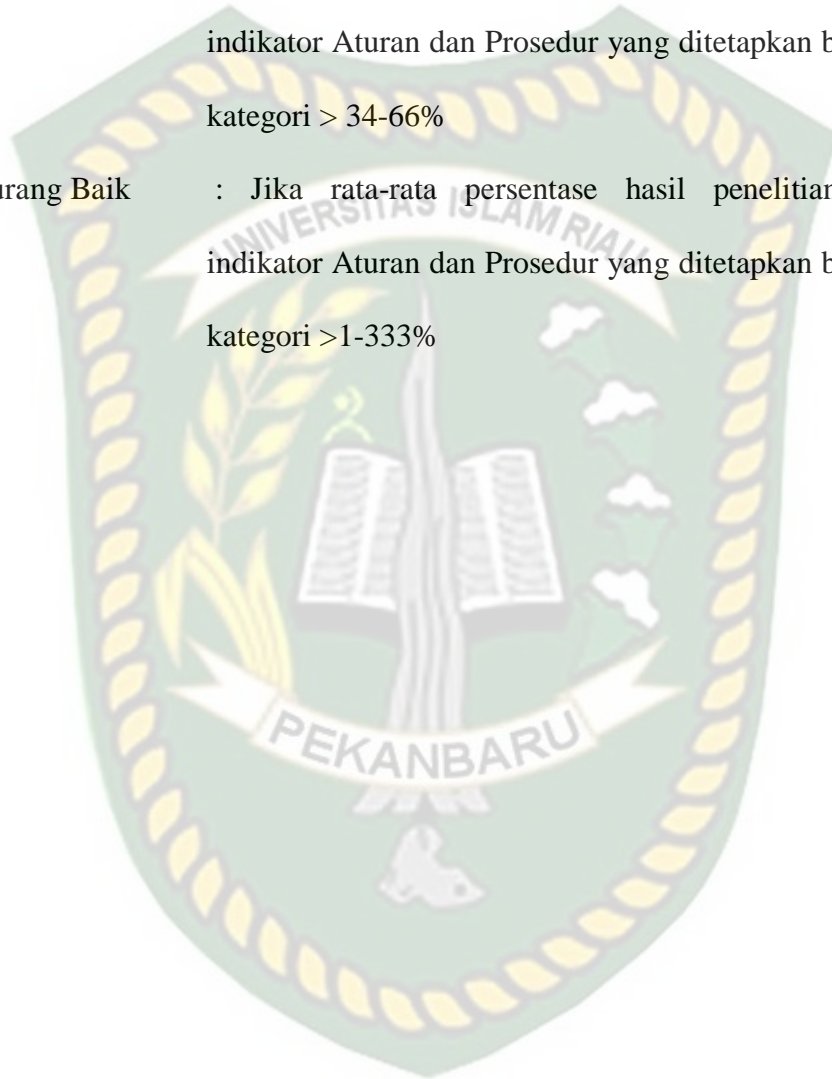
Kurang Baik : Jika rata-rata persentase hasil penelitian terhadap indikator Aturan dan Prosedur yang diterapkan berada pada kategori > 1-33%

4. Mengadakan pertemuan informal

Baik : jika rata-rata Persentase hasil penelitian terhadap indikator Rencana dan Penetapan Tujuan yang ditetapkan berada pada kategori > 67-100%

Cukup Baik : Jika rata-rata persentase hasil penelitian terhadap indikator Aturan dan Prosedur yang ditetapkan berada pada kategori > 34-66%

Kurang Baik : Jika rata-rata persentase hasil penelitian terhadap indikator Aturan dan Prosedur yang ditetapkan berada pada kategori > 1-33%



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sesuai dengan permasalahan penelitian, dengan tipe penelitian survey deskriptif yaitu penelitian yang hasilnya diketahui melalui gambaran dari data yang dianalisis sehingga memberikan gambaran yang sebenarnya seperti apa yang sebenarnya yang terjadi dilapangan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. Penulis memilih untuk melakukan penelitian di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar karena penulis lebih memahami situasi dan kondisi di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar, dan juga di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar masih minimnya akan pembangunan yang mana di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar tersebut pemerintah Kecamatan belum bekerja dengan baik sesuai dengan tugas dan jabatannya.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek/subjek penelitian yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kecamatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan, Kepala Desa dan Masyarakat.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Maka sampel pada penelitian ini merupakan sebagian dari pegawai Kantor Camat Kampar Kiri Hulu dan sebagian dari masyarakat Kecamatan Kampar Kiri Hulu untuk lebih jelasnya mengenai sampel penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 111.1 : Jumlah Populasi dan Sampel di Kecamatan Kampar Kiri Hulu

No	Populasi	Jumlah		Persentase
		populasi	Sampel	
1.	Camat Kampar Kiri Hulu	1	1	100%
2.	Kepala Seksi Pembedayaan	1	1	100%
3.	Anggota Seksi Pemberdayaan	3	3	100%
4.	Kepala Desa seKecamatan Kampar Kiri Hulu	24	3	12%
5.	Unsur Masyarakat			
	• Desa Tanjung Belit	470 KK	10	2%
	• Desa Gema	976 KK	20	2%
	• Tanjung Belit Selatan	289 KK	5	2%
	Jumlah	1764	43	2,44%

Sumber : Data Olahan Penulis, 2017

D. Teknik Penarikan Sampel

Untuk teknik penarikan sampel pada penelitian ini penulis menggunakan teknik sensus untuk Camat Kampar Kiri Hulu berjumlah 1 orang, Kepala Seksi Pemberdayaan 1 orang, Anggota Seksi Pemberdayaan 3 orang, selanjutnya untuk Kepala Desa dengan parpositive sampling dijadikan sebagai sampel untuk mewakili populasi yang ada di 24 desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu, dan ditambah lagi dari unsur masyarakat di Desa Tanjung Belit 10 orang, desa Gema 20 orang dan desa Tanjung Belit Selatan 5 orang, juga dengan purpositive sampling.

E. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini maka jenis data dan sumber data yang diperlukan adalah :

1. Data Primer : yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui penelitian lapangan, baik berupa Observasi, wawancara, maupun kuisisioner. Dalam penelitian ini data primer yang dibutuhkan adalah data yang berhubungan dengan Tugas Camat dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. Yang mana data tersebut di dapatkan dari Pemerintah Desa Tanjung Belit, Desa Gema, Desa Tanjung Belit Selatan dan Masyarakat setempat dengan menggunakan indikator seperti Mengadakan Pertemuan Resmi, Mengangkat Suatu Tim, Membuat Buku Pedoman, Mengadakan Pertemuan Informal.
2. Data Skunder : yaitu data yang diperoleh secara langsung berupa dokumen, arsip, dan buku-buku yang telah ada di Kantor Camat Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Wawancara : Yaitu melakukan Tanya jawab atau dialog langsung kepada sampel yang sudah terpilih menjadi responden penelitian. Adapun teknik yang digunakan adalah indept interview (wawancara mendalam), yang

mana wawancara ini dilakukan seperti Tanya jawab antara peneliti dengan responden langsung bertatap muka.

2. Observasi : Yaitu suatu teknik pengumpulan data dimana peneliti langsung turun kelapangan biar dapat mengetahui secara langsung fenomena-fenomena yang terjadi di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. Data yang didapat dalam teknik ini seperti Data Penduduk, Data kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Mengenai Penyediaan Sarana dan Prasarana Untuk Pengembangan Usaha Tani, Data kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Mengenai Penyediaan Sarana dan Prasarana Untuk Pengembangan Usaha Ternak, Data kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Mengenai Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum.
3. Kuesioner : Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memberikan daftar pertanyaan yang terstruktur kepada responden penelitian yang berhubungan dengan penelitian. Disini teknik yang digunakan dengan cara memberi daftar pertanyaan yang telah di tulis kepada responden dan meminta mereka untuk mengisi atau menjawaban dari pertanyaa yang telah disediakan. Disini peneliti menunggu responden untuk mengisi lembaran kuesioner yang diberikan, setelah responden selesai mengisi pertanyaan yang ada dalam lembaran kuesioner maka peneliti mengambil kembali lembaran tersebut dan melihat jawaban apa yang telah diberikan oleh responden, kemudian peneliti memberikan kembali kuesioner tersebut kepada responden sebagai bukti kenangan bahwa mereka pernah di teliti.

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data dengan metode kuantitatif secara deskriptif, yaitu suatu analisa yang memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan yang ditemui dilapangan dengan tabel dan uraian kemudian dianalisa selanjutnya diambil kesimpulan yang dapat memberikan gambaran tentang Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

H. Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian

Adapun jadwal kegiatan penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel III.2 : Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

No	Jenis kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2016/2017																K e T
		Agustus				Maret				April				Agustus				
1	2	3				4				5				6				7
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Penyusunan UP																	
2	Seminar UP																	
3	Revisi UP																	
4	Penelitian lapangan																	
5	Pengolahan dan analisis data																	

6	Konsultasi bimbingan skripsi																		
7	Ujian skripsi																		
8	Revisi dan pengesahan skripsi																		
9	Pengadaan serta penyerahan skripsi																		



BAB IV

DESKRIPSI LOKAL PENELITIAN

A. Sejarah Kecamatan Kampar Kiri Hulu

Kecamatan Kampar Kiri Hulu merupakan Kecamatan termuda di Kabupaten Kampar. Yang diresmikan oleh Bupati Kampar pada tanggal 10 Oktober 1998. Daerah ini berdataran rendah mudah dilanda banjir. Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar merupakan Kecamatan yang minim akan sentuhan pembangunan, terutama infrastruktur jalan, padahal Kecamatan ini banyak tersimpan hasil bumi, seperti karet serta hasil peternakan kerbau dan sapi. Secara umum sumber perekonomian masyarakat adalah berkebun karet. Luas wilayah yang dimiliki Kecamatan Kampar Kiri Hulu 81.935 ha/m², yang terdiri dari 24 Desa, memiliki Kepala Keluarga sebanyak 8.668 KK, serta jumlah penduduk 11.834 Jiwa, dengan bentuk topografi tanah daratan.

1. Kondisi wilayah

Kecamatan Kampar Kiri Hulu adalah berdataran rendah dan mudah dilanda banjir karena dikelilingi oleh sungai-sungai

2. Luas wilayah

Luas wilayah Kecamatan Kampar Kiri Hulu berdasarkan luas pemukiman 1,875 ha/m², luas perkebunan 75.750 ha/m², dan luas kuburan 40 ha/m², luas pekarangan 5.250 ha/m², luas perkantoran 8 ha/m², dan luas prasarana umum lainnya 12 ha/m², dan total luas keseluruhan yang dimiliki oleh Kecamatan Kampar Kiri Hulu adalah 81.935 ha/m²

3. Keadaan alam

Kondisi iklim di wilayah Kecamatan Kampar Kiri Hulu secara umum beriklim tropis dengan dua arah angin musiman yang secara signifikan berpengaruh terhadap pola kejadian hujan wilayah ini. Musiman hujan biasanya terjadi pada bulan September s/d Februari, sedangkan musiman kemarau biasanya terjadi pada bulan Maret s/d Agustus. Dengan iklim seperti ini menjadikan Kecamatan Kampar Kiri Hulu sebagai daerah yang subur akan pertanian dan perkebunan.

4. Batas-batas Kecamatan

Kecamatan Kampar Kiri Hulu berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kampar Kiri
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kampar Kiri Hilir
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumbar

5. Adat dan sosial budaya

a. Adat Istiadat

Adat di Kecamatan Kampar Kiri Hulu ini sangat terkenal dengan mempertahankan budaya mereka dan pada umumnya budaya itu berlandaskan agama Islam. Malu merupakan budaya yang sangat sensitive dan tetap dipertahankan. Tidak jarang mereka mengorbankan diri hanya untuk mempertahankan dan menghilangkan rasa malu. Tegur sapa apabila bertemu. Dalam pergaulan sehari-hari masyarakat di Kecamatan Kampar Kiri Hulu ini terkenal sangat santun, ramah, dan sangat bersahabat, mereka saling menyayangi, saling menghargai, saling menghormati, mempunyai sifat tolong menolong dan

bergotong royong merupakan kegiatan yang masih dilakukan dan dengan semangat yang tinggi masyarakatnya melakukan itu.

b. Sosial Budaya

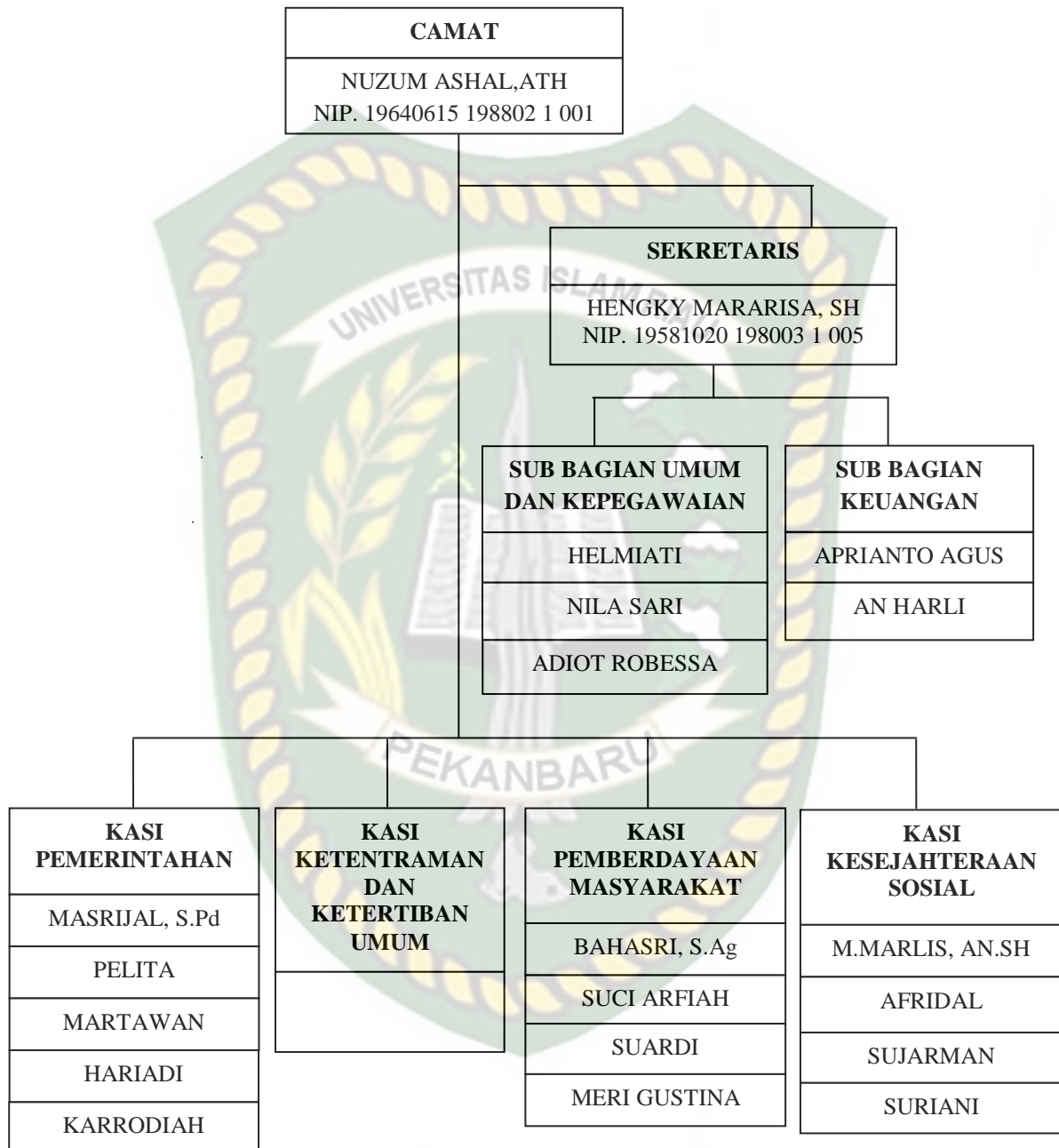
Adapun kebudayaan bagi masyarakat Kecamatan Kampar Kiri Hulu selalu dikaitkan dengan nilai-nilai ajaran Agama. Adapun adat sosial budaya yang mempunyai nilai Agama yaitu salah satunya Maulid Nabi Muhammad SAW yaitu bentuk seni budaya masyarakat Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Maulid juga dapat disebut sebagai kegiatan keagamaan. Tujuan dari maulid tersebut meningkatkan kembali sejarah hidup Nabi Muhammad SAW.

B. Gambaran Umum Kantor Camat Kampar Kiri Hulu

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah pusat dapat menyelenggarakan sendiri atau dengan cara desentralisasi, melimpahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada perangkat pemerintah/wakil pemerintah di daerah berdasarkan azas dekonsentrasi, dan juga dapat menugaskan pemerintah daerah berdasarkan azas tugas pembantuan. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kedudukan Kecamatan dirubah menjadi perangkat daerah Kabupaten/Kota, yang menurut Undang-undang ini Camat di angkat oleh Bupati atau Walikota atas usulan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat, Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Kabupaten/Kota serta tanggung jawab kepada Bupati/Kota.

C. Struktur Kantor Kantor Camat Kampar Kiri Hulu

Gambar IV.1: Struktur Kantor Camat Kampar Kiri Hulu



Sumber : Kantor Camat Kampar Kiri Hulu, 2017

D. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Camat Kampar Kiri Hulu

1. Camat

Camat mempunyai tugas dan fungsi dalam melaksanakan, mengkoordinasikan, mengawasi, mengendalikan tugas umum pemerintahan dan meaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oeh Bupati untuk menangani sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Camat mempunyai tugas dan fungsi sesuai PERBUP Kampar Nomor 72 Tahun 2016 sebagai berikut:

1. Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintah umum
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat Kecamatan
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa

- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang di Kecamatan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang di perintah oleh peraturan perundang-undangan
2. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, dibantu oleh sekretaris dan kepala seksi. Seksi sebagaimana dimaksud diatas:

- a. Seksi pemerintahan
- b. Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa
- c. Seksi ketentraman dan ketertiban

2. Sekretariat

Adapun tugas dan fungsi Sekretariat Kecamatan sesuai PERBUP Kampar Nomor 72 tahun 2016 sebagai berikut:

1. Sekretaris dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan tugas dan fungsi:
 - a. Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan
 - b. Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan
 - c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, keuangan serta pengelolaan perencanaan , evaluasi dan pelaporan
 - d. Pengkoordinasian, urusan umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kecamatan
 - e. Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan Kecamatan
 - f. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Kecamatan
 - g. Menkoordinasikan setiap seksi dalam penyusunan LPPD, LKPJ, PENJA, IKU dan segala bentuk pelaporan lainnya
 - h. Merumuskan program dan kegiatan lingkup sekretariat
 - i. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - j. Mengkoordinasikan, menghimpun, menganalisa, dan mengevaluasi program dan pelaporan dari setiap seksi
 - k. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada Kecamatan
 - l. Menganalisa kebutuhan pegawai pada kecamatan

- m. Menganalisa kebutuhan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana
 - n. Membagi tugas, member petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - o. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan
 - p. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan atau kegiatan kepada atasan
 - q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh atasan.
- Sekretaris camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas dibantu oleh sub bagian terdiri dari :
- a. Sub bagian umum
 - b. Sub bagian keuangan

3. Sub Bagian Umum

Adapun tugas dan fungsi Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai PERBUP Nomor 72 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas administrasi umum, kepegawaian dan perencanaan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas dan fungsi:

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian sesuai dengan rencana kerja Sekretaris
- b. Menyusun dan menyiapkan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan, program dan kegiatan sub bagian
- c. Membantu Sekretaris melaksanakan pengelolaan penyusunan administrasi program/perencanaan
- d. Menyiapkan bahan, mengkoordinasi dan penyusunan laporan LPPD, LKPJ, LKJIP, PENJA, IKU, RENJA, RENSTRA dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya
- e. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa data sebagai bahan acuan dalam penyusunan program kerja
- f. Menganalisa kebutuhan, melaksanakan pengadaan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana dan prasarana dilingkungan Kecamatan agar efektif dan efisien
- g. Mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan ketentuan Tata Naskah Dinas (TND) yang berlaku
- h. Menganalisa kebutuhan personel untuk masing-masing seksi dan melakukan pengurusan administrasi kepegawaian personel lingkup Kecamatan

- i. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- j. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan
- k. Membagi tugas, member petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- l. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi

4. Sub Bagian Keuangan

Adapun tugas dan fungsi Sub Bagian Keuangan sesuai PERBUP Kampar Nomor 72 Tahun 2016 sebagai berikut:

1. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas keuangan lingkup Kecamatan
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian Keuangan melaksanakan tugas dan fungsi:
 - a. Menghimpun dan menyusun rencana kerja Sub Bagian sesuai dengan rencana kerja Sekretaris

- b. Menyusun dan menyiapkan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Sub Bagian
- c. Menghimpun, memaduserasikan dan menyusun bahan program, kegiatan serta anggaran dari masing-masing seksi
- d. Menghimpun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari setiap seksi
- e. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK
- f. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
- g. Menyiapkan SPM lingkup Kecamatan
- h. Menyelenggarakan pembuatan daftar gaji, tunjangan, honor, uang lembur, biaya perjalanan dinas dan kesejahteraan pegawai
- i. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring pelaksanaan anggaran pendapat dan pengeluaran Kecamatan
- j. Menyelenggarakan verifikasi, pertanggungjawaban keuangan akuntansi dan pelaporan

- k. Melaksanakan pembinaan terhadap bendahara penerimaan dan pengeluaran serta personel pengelolaan keuangan lingkup Kecamatan
- l. Menyiapkan bahan serta memfasilitasi kegiatan pengawasan oleh fungsional pengawasan
- m. Melaksanakan administrasi asset daerah dilingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- n. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternative pemecahannya
- o. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan
- p. Membagi tugas, member petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- q. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/ atau kegiatan kepada atasan
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

5. Seksi Pemerintahan

Adapun tugas dan fungsi Seksi Pemerintahan sesuai PERBUP Kampar Nomor 72 Tahun 2016 sebagai berikut:

1. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pemerintahan
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Pemerintahan melaksanakan tugas dan fungsi:
 - a. Menghimpun dan menyusun rencana kerja seksi sesuai dengan rencana kerja Kecamatan
 - b. Menyusun dan menyiapkan bahan dan tata dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Seksi
 - c. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan umum
 - d. Menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pembinaan terhadap Pemerintahan Desa, meliputi:
 1. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan terhadap tertib administrasi pemerintahan Desa
 2. Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian bimbingan, supervise, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa
 3. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengawasan Perangkat Desa
 4. Menyiapkan bahan dalam rangka penyelesaian perselisihan Desa dalam satu wilayah Kecamatan
 5. Menyiapkan bahan dalam rangka musyawarah Desa

6. Menyiapkan bahan dalam rangka usulan pemekaran, peningkatan, penyatuan dan atau penghapusan Desa
7. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan lembaga kemasyarakatan
8. Menyiapkan bahan dalam rangka kerjasama antar Desa
9. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan batas-batas wilayah
- e. Melaksanakan fasilitasi administrasi kependudukan dan fasilitasi instansi terkait pelaksanaan ketenagakerjaan dan transmigrasi, sosial, urbanisasi, emigrasi/imigrasi
- f. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya
- g. Melaksanakan kegiatan keagrariaan di Kecamatan, meliputi:
 1. Pembantuan pendataan tanah
 2. Pemeliharaan data pertanahan
 3. Pengelolaan bahan dalam rangka pembuatan akte tanah dan surat-surat mengenai : peralihan hak atas tanah, keterangan status dan bukti kepemilikan tanah, keterangan penggadaian tanah, keterangan kewarisan, keterangan peminjaman dimana tanah sebagai jaminan
- h. Melaksanakan legalisasi administrasi pertanahan meliputi:
 1. Surat Keterangan Waris
 2. Surat Kuasa Waris

3. Permohonan Ukur Tanah
 4. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah
 5. Surat persetujuan pembagian hak bersama
- i. Mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan urusan kesatuan bangsa dan politik serta penyuluhan hukum
 - j. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
 - k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginvebtarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya
 - l. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan
 - m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - n. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan / atau kegiatan kepada atasan
 - o. Penyusunan dan melaksanakan survey kepuasan masyarakat, standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur si Saksi
 - p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Adapun tugas dan fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai PERBUP Kampar Nomor 72 Tahun 2016 sebagai berikut:

1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum melaksanakan tugas dan fungsi:
 - a. Membuat perencanaan dan program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - b. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan
 - c. Membuat program kerja dibidang Trantib
 - d. Melakukan pembinaan terhadap perlindungan masyarakat
 - e. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan Kesatuan P{olisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) di wilayah kerjanya
 - f. Menegakkan dan melaksanakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta peraturan perundang-undang diwilayah kerjanya
 - g. Melaksanakan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa izin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup

- h. Monitoring dan pengawasan terhadap bangunan liar dan bangunan lainnya diwilayah Kecamatan
- i. Mengkoordinir bantuan-bantuan penanggulangan bencana
- j. Melakukan mitigasi dan penanggulangan bencana di Kecamatan
- k. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan anggota BPD
- l. Melakukan pengawasan dan pemantauan dalam pelaksanaan kegiatan pembebasan tanah
- m. Membantu Camat dalam pengawasan dan pemantauan terhadap pengurusan maupun pelaksanaan setiap izin yang dikeluarkan, agar sesuai dengan Peraturan Daerah atau ketentuan yang berlaku
- n. Memproses rekomendasi terhadap penertiban izin sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
- o. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Adapun tugas dan fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai PERBUP Kampar Nomor 72 Tahun 2016 sebagai berikut:

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Selsi yang mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam mbahan

perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), seksi Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan tugas dan fungsi:
 - a. Membuat perencanaan dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - b. Melakukan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa
 - c. Memfasilitasi kegiatan organisasi social/ kemasyarakatan, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
 - d. Memfasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan diwilayah kerjanya
 - e. Melaksanakan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana
 - f. Memfasilitasi pengembangan perekonomian
 - g. Melakukan pengawasan dan monitoring bantuan yang diberikan Pemerintah kepada Desa
 - h. Melakukan usulan anggaran yang diajukan oleh Desa
 - i. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi

8. Seksi Kesejahteraan Sosial

Adapun tugas dan fungsi Seksi Kesejahteraan Sosial sesuai PERBUP Kampar Nomor 72 Tahun 2016 sebagai berikut:

1. Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Kesejahteraan Sosial.
2. Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Kesejahteraan Sosial melaksanakan tugas dan fungsi:
 - a. Membuat perencanaan dan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial
 - b. Melaksanakan pembinaan terhadap kehidupan kerukunan beragama antar umat beragama
 - c. Membina kegiatan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat
 - d. Membantu pembinaan Keluarga Berencana
 - e. Melakukan kegiatan perayaan hari-hari besar keagamaan dan hari besar nasional
 - f. Melakukan kegiatan generasi muda dan kewanitaan
 - g. Melakukan pembinaan terhadap organisasi siswa, organisasi keagamaan
 - h. Melakukan pembinaan masalah kenakalan anak remaja, penyalahgunaan narkoba dan masalah sosial
 - i. Meneliti dan melegalisasi surat keterangan ahli waris yang ditertibkan Kepala Desa
 - j. Memproses surat-surat keterangan miskin dan tidak mampu
 - k. Membantu pembinaan PKK

- l. Melaksanakan pembinaan terhadap kesejahteraan keluarga
- m. Melaksanakan penyusunan rencana dan program dalam bidang kebersihan
- n. Melakukan pembinaan terhadap kebersihan lingkungan masyarakat
- o. Merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi bidang kebersihan di lingkungan masyarakat Desa
- p. Melaksanakan kegiatan penyehatan lingkungan pemukiman dengan budaya hidup bersih
- q. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelayanan kebersihan kawasan perkotaan dan pedesaan
- r. Mengkoordinasikan, pembinaan, dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan
- s. Melaksanakan pengawasan dan pengelolaan ketertiban, kebersihan dan keindahan (K3) di Kecamatan
- t. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Sosial
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

E. Sumber Daya Kantor Camat Kampar Kiri Hulu

Dalam sebuah organisasi publik atau privat yang mana harus mempunyai SDO atau Sumber Daya Organisasi yang merupakan modal awal organisasi untuk

bergerak dan melaksanakan segala kegiatannya secara efektif dan efisien. SDO tersebut terdiri dari man, money, machine, method, dan market. Pada kantor Camat Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar sebagai organisasi publik tentunya pasti terdapat Sumber Daya Organisasi yang mana paling penting ialah Sumber Daya Manusia berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.1 Daftar Pegawai Kantor Camat Kampar Kiri Hulu

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana	0
2	Sarjana	2
3	Diploma III	8
4	SMA	14
	Jumlah	24

Sumber: Kantor Camat Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar, 2017

Dari tabel diatas terlihat bahwa Kantor Camat Kampar Kiri Hulu memiliki Sumber Daya Manusia yaitu Pegawai sebanyak 24 orang yang mana tingkat pendidikan yang paling dominan terdapat pada Kantor Camat Kampar Kiri Hulu ialah SMA sebanyak 14 orang serta didukung oleh Pendidikan Strata 1 dan Diploma III sehingga sumber daya manusia Kecamatan Kampar Kiri Hulu tergolong dalam kategori memadai.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini disajikan hasil penelitian yang telah dilakukan berupa distribusi frekuensi hasil kuesioner tentang indikator koordinasi Camat Kampar Kiri Hulu dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, dalam penyajian data hasil penelitian ini, diuraikan beberapa aspek antara lain, identitas responden. Data ini diuraikan untuk menggambarkan karakteristik responden sehingga dapat memahami situasi responden pada lokasi penelitian dan pada penelitian ini juga. Kemudian deskripsi hasil kuesioner yang disebarkan pada responden dilanjutkan dengan analisis data yang sudah diperoleh di padukan dengan hasil wawancara yang diperoleh dari informal.

A. Identitas Responden

Identitas responden pada penelitian ini akan dikelompokkan dan disusun terdiri dari jenis kelamin, kelompok umur dan tingkat pendidikan yang bertujuan untuk mendeskripsikan keadaan responden pada penelitian ini. Selanjutnya akan dijelaskan identitas responden mulai dari jenis kelamin, umur dan pendidikan. Pembahasannya sebagai berikut

1. Jenis Kelamin

Jenis kelamin disini adalah untuk menggambarkan banyaknya responden yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan tidak ada tujuan yang membandingkan dan melihat pengaruh pengambilan jawaban dari jenis kelamin tersebut, maka dari itu identitas responden penelitian berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. V.1. Distribusi Responden Penelitian berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Populasi	Persentase
1	Laki-Laki	37	86%
2	Perempuan	6	13%
Jumlah		43	100%

Sumber : Data Penelitian, 2017

Dari tabel V. 1 diatas terlihat bahwa dalam penelitian ini responden penelitian didominasi oleh responden berjenis kelamin laki-laki yaitu berjumlah 37 orang atau 86%

2. Kelompok Umur

Kelompok umur disini ialah penulis akan mengelompokkan umur responden dengan cara tingkatan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran dari umur responden penelitian, maka tabel mengenai informasi pengelompokkan umur dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel V. 2. : Distribusi jumlah responden berdasarkan tingkatan umur

No	Umur	Responden	Persentase
1	≤ 30 tahun	6	14%
2	30 - 39 tahun	20	46%
3	40 - 49 tahun	13	30%
4	≥ 50 tahun	4	9%
Jumlah		43	100%

Sumber : Data Penelitian, 2017

Dari tabel V. 2 diatas terlihat bahwa responden penelitian pada tingkat umur terbanyak ialah pada umur 30-39 tahun yaitu berjumlah 20 orang responden atau 46%,

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan disini akan menggambarkan identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh agar dapat menggambarkan bagaimana keadaan responden penelitian dari tingkat pendidikannya, maka distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V. 3. : Distribusi jumlah responden berdasarkan tingkat pendidikan

No.	Tingkat pendidikan	Responden	Persentase
1	SD	0	0
2	SMP	13	30%
3	SMA/ SLTA	23	53%
4	Diploma	0	0
5	Sarjana	7	16%
6	Pascasarjana	0	0
Jumlah		43	100%

Sumber : Data Penelitian, 2017

Dari tabel V. 3 diatas terlihat bahwa pada responden penelitian didominasi oleh tingkatan pendidikan SLTA atau SMA yaitu berjumlah 23 responden atau 53%.

B. Hasil dan Pembahasan Penelitian

Pemberdayaan merupakan salah satu fungsi pemerintahan dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi dan lingkungan menjadi lebih baik, pemberdayaan bukan hanya kebijakan pemerintah pusat melainkan juga merupakan tugas yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakannya, khususnya pada wilayah kecamatan merupakan tugas umum pemerintah yang dipegang oleh Camat sebagai pemimpin wilayah Kecamatan. Disini ialah Camat sebagai koordinator kegiatan pemberdayaan

masyarakat yang mana diharapkan Camat dapat memberikan pengarahan, mengajak masyarakat untuk ikut dalam kegiatan menjaga hubungan baik dengan komunikasi yang baik pula.

Tetapi permasalahan terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar masih menjadi seperti kurangnya informasi yang diberikan Pemerintah Kecamatan, kurangnya komunikasi dan partisipasi masyarakat dan pihak Kecamatan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, maka dari itu terlihat Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan melihat Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar dengan variabel yaitu Koordinasi, dan indikator yaitu Mengadakan Pertemuan Resmi, Mengangkat Suatu Tim, Membuat Buku Pedoman dan Mengadakan Pertemuan Informal dengan teknik pengumpulan data dari hasil penelitian tersebut akan disajikan melalui tabel frekuensi pemilihan jawaban dari responden yang terdiri dari Pemerintah Kecamatan yang terdiri dari 3 Desa, maka dari itu selanjutnya akan dijelaskan hasil penelitian melalui indikator dengan cara perindikator yang mana dapat dilihat dibawah ini:

- a. Mengadakan Pertemuan Resmi
- b. Mengangkat Suatu Tim
- c. Membuat Buku Pedoman

d. Mengadakan Pertemuan Informal

Setelah menyebarkan kuisioner kepada responden yang ikut terlibat dalam Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Kampar Kiri Hulu yang terdiri dari Unsur Pimpinan Kecamatan atau Aparatur Pemerintah Kecamatan, Aparatur Pemerintah Desa atau Kelurahan dan yang merasakan dampak dari koordinasi itu sendiri yaitu Masyarakat Desa atau Kelurahan, maka selanjutnya penulis mengolah data tersebut, melakukan pengelompokan data berdasarkan indikator dan item penilaian masing-masing serta akan dijelaskan berurutan perindikator dan item penilaian masing-masing responden penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Mengadakan Pertemuan Resmi

Mengadakan pertemuan resmi adalah membahas dan mengadakan pertukaran pikiran dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan tujuan mereka akan berjalan seiring dan bergandengan mencapai tujuan. Mengadakan pertemuan resmi juga dapat diartikan antar unsur-unsur atau unit-unit yang harus dikoordinasikan. Dalam pertemuan seperti ini, diadakan pertukaran pikiran antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan tujuan mereka akan sering dan beriringan dalam mencapai tujuan (Manullang, 2008:72)

Dalam penelitian ini seharusnya Camat selaku perpanjangan tangan Bupati/Walikota dalam menjalankan tugasnya Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kerjanya dengan cara Mengadakan Pertemuan Resmi dengan Aparatur Desa beserta Tokoh Masyarakat yang ada di Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Untuk menilai tingkat pelaksanaan indikator Mengadakan Pertemuan

Resmi sebagai bagian dari kegiatan Koordinasi Camat Kampar Kiri Hulu dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, maka dapat dilihat dari tanggapan responden terhadap Sub indikator penelitian sebagai berikut:

- a. Mengadakan rapat atau musyawarah
- b. Pertemuan melibatkan instansi terkait
- c. Adanya kerjasama antara pihak

Rapat atau musyawarah diadakan di Kantor Camat, pertemuan ini diadakan minimal 1 kali dalam 2 bulan yang hanya melibatkan Camat, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Desa dan masyarakat setempat dalam rangka membahas program yang sedang berjalan dan disini Kepala Desa dan masyarakat mempunyai kesempatan untuk menyampaikan keluhan ataupun hambatan selama program pemberdayaan masyarakat itu berlangsung. Berikut data pertemuan resmi yang di adakan di kantor Camat Kampar Kiri Hulu sebagai berikut:

V.4 : Data Pertemuan Resmi Yang Di Adakan Di Kantor Camat Kampar Kiri Hulu

No	Nama	Jabatan	Kelurahan/Desa
1	2	3	4
1	Nuzum Ashal,ATH	Camat	Padang Sawah
2	Hengky Mararisa, SH	Sekretaris Camat	Lipat Kain
3	Bahasri, S. Ag	Ketua Kasi pemberdayaan	Gema
4	Efri Desmi	Kades	Tanjung Belit
5	Rajilus Rahman	Kades	Tanjung belit Selatan
6	Pandi Ardiansyah	Kades	Batu Sanggan
7	Riko Ambar	Kades	Gema
8	Budi Hartono	Kades	Muara Bio
9	Kunnardi	Sekdes	Kota Lama
10	Amri	Kades	Aur Kuning
11	Ludi mariadi	Anggota	Aur Kuning
12	Rion saputra	Anggota	Kota Lama
13	Yudi Aditia	Anggota	Tanjung Belit

1	2	3	4
14	Romi irawan	Anggota	Tanjung Belit
15	Risman	Anggota	Gema
16	Yopi Andara	Anggota	Tanjung Belit Selatan
17	Zainal	Anggota	Tanjung Belit Selatan
18	Robbi	Kades	Tanjung Beringin
19	Dedi Arianto	Anggota	Tanjung Beringin
20	Yatim	Anggota	Gema
21	Herman	Anggota	Batu Sanggan
22	Syafrizal	Anggota	Batu Sanggan
23	Anggia Putra	Anggota	Tanjung Beringin
24	Mandala	Anggota	Muara Bio

Sumber: Kantor Camat Kampar Kiri Hulu, 2016

Adapun agenda dari pertemuan ini untuk membahas program pemberdayaan mengenai usaha tani yang sedang berjalan di 7 Desa yang mana Desa Gema, Desa Tanjung Belit, Desa Tanjung Belit Selatan, Desa Batu Sanggan, Desa Muara Bio, Desa Kota Lama dan Desa Aur Kuning yang di adakan pada tanggal 20 Juni 2016 di Kantor Camat Kampar Kiri Hulu.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Saudara Nuzum Ashal,ATH selaku Camat Kampar Kiri Hulu tentang pelaksanaan pertemuan resmi yang dilakukannya dengan mengajukan pertanyaan “Apakah Camat Kampar Kiri Hulu pernah melakukan pertemuan resmi dengan instansi terkait dan siapa saja yang terkait didalamnya?”. Jawaban sebagai berikut:

“Pertemuan resmi maupun pertemuan lainnya selalu kami lakukan karena ini merupakan suatu bentuk dari koordinasi dan biasanya di dalam pertemuan resmi ini Perangkat Desa dan tokoh masyarakat selalu hadir dan terlibat di dalamnya untuk lebih memudahkan berjalannya pemberdayaan masyarakat dengan mendengarkan keluhan dan permasalahan secara langsung dari masyarakat itu sendiri”. (Hasil wawancara 20 April 2017) .

Berikut ini adalah tanggapan responden Unsur Aparatur Kecamatan dan Masyarakat tentang indikator mengadakan pertemuan resmi oleh Camat Kampar Kiri Hulu sebagai berikut:

Tabel. V. 5. Distribusi frekuensi Jawaban responden penelitian mengenai mengadakan pertemuan resmi

No	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Mengadakan Rapat atau Musyawarah	6	37	0	43
2	Pertemuan melibatkan instansi terkait	18	25	0	43
3	Adanya kerjasama antar pihak	16	27	0	43
Jumlah		40	89	0	129
Rata-Rata		13	30	0	43
Persentase		30%	70%	0	100%

Sumber: Pengolahan data Penelitian, 2017

Berdasarkan data tabel V. 5 diatas tanggapan responden indikator tentang mengadakan pertemuan resmi menggunakan 43 responden dengan item penilaian mengadakan rapat atau musyawarah mendapatkan jumlah 37 responden menjawab cukup baik , pertemuan melibatkan instansi terkait berjumlah 25 responden menjawab cukup baik, adanya kerjasama antar pihak berjumlah 27 responden menjawab cukup baik. Sesuai dengan teknik pengukuran yang penulis tetapkan sebelumnya maka berdasarkan hasil tanggapan responden unsur pimpinan Kecamatan dan aparatur pemerintah terdapat pelaksanaan indikator pengadaan pertemuan resmi di lihat dari tabel diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengadaan pertemua resmi dari tiga sub indikator berada pada kategori cukup baik dengan jumlah rata-rata 30 dari 43 responden

berada pada persentase mencapai 70%. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan jawaban responden aparaturnya pemerintah kecamatan mengadakan pertemuan resmi yang dilakukan oleh Camat selama ini sudah **cukup baik** karena Camat Kampar Kiri Hulu benar-benar mengadakan pertemuan resmi dengan pemerintah desa dan masyarakat guna untuk membahas program pemberdayaan masyarakat mengenai usaha tani yang sedang berjalan di Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Disini Camat juga mengajak masyarakat untuk bekerjasama dalam mewujudkan program pemberdayaan masyarakat di bidang usaha tani supaya berjalan dengan lancar dan membawa perubahan yang positif dan perkembangan yang baik untuk masyarakat umumnya yang ada di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

2. Mengangkat Suatu Tim

Mengangkat suatu tim merupakan mengangkat seseorang, suatu tim atau panitia koordinasi yang khusus bertugas melakukan kegiatan-kegiatan koordinasi seperti member penjelasan atau bimbingan kepada setiap unit-unit yang di koordinasikannya. (Manullang, 2008: 72). Dalam mengangkat suatu tim koordinasi dalam tahap persiapan sebelum dilakukannya musyawarah dan eksekusi sangat bermanfaat dalam proses memfasilitasi dan memastikan agar penyelenggaraan keamanan dan ketertiban yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar dengan mengumpulkan pendapat dan saran dari berbagai pihak.

Mengangkat suatu tim kerja yang dilakukan oleh Camat merupakan bagian dari kegiatan koordinasi dalam lingkungan kerjanya mestilah dilakukan dengan melihat kemampuan dan kondisi instansi terkait sehingga dapat disesuaikan

dengan program-program kerja yang hendak di laksanakan. Untuk menilai tingkat pelaksanaan Indikator Mengangkat Suatu Tim sebagai bagian dari Koordinasi Camat Kampar Kiri Hulu dalam pemberdayaan Masyarakat. Maka dapat dilihat dari taangapan responden terhadap sub indikator sebagai berikut:

- a. Memberi bimbingan
- b. Memberikan penjelasan secara rinci
- c. Mensosialisasikan

Dari hasil wawancara yang di lakukan dengan Saudara Bahasri, S.Ag selaku Ketua Kasi Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kampar Kiri Hulu dengan pertanyaan “Apakah Camat pernah membentuk tim dalam program pemberdayaan masyarakat?”. Jawabannya sebagai berikut:

“Dalam mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat seperti memberi bimbingan, memberikan penjelasan, mensosialisasikan, maka Camat telah membentuk suatu tim yang bertugas dalam bidang itu. Hal itu dipercayakan kepada Seksi Pemberdayaan Masyarakat”. (Hasil wawancara 20 April 2017).

Tabel. V. 6. Data Tim Program Pemberdayaan Masyarakat Mengenai Usaha Tani Tahun Anggaran 2015/2016.

No	Nama	Anggota
1	Bahasri, S. Ag	Ketua
2	Suci Arfiah	Bendahara
3	Suardi	Anggota
4	Sujarman	Anggota
5	Suriani	Anggota

Sumber : Kantor Camat Kampar Kiri Hulu, 2016

Dari data tabel V.6 diatas menjelaskan tim yang dibentuk oleh Camat Kampar Kiri Hulu berjumlah 5 orang yang mana Bahasri,S.Ag selaku Kasi

Pemberdayaan Masyarakat ditunjuk sebagai ketua Tim Program Pemberdayaan. Hal ini menjelaskan bahwa Camat Kampar Kiri Hulu benar membentuk suatu tim guna untuk membantu kelancaran program pemberdayaan masyarakat di bidang usaha tani yang ada di Desa Tanjung Belit, Desa Gema dan Desa Tanjung Belit Selatan.

Setelah penyebaran kuisioner dan pengumpulan data maka di dapatkan jawaban responden penelitian yang dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel. V. 7. Distribusi frekuensi Jawaban responden penelitian mengenai mengangkat suatu tim

No	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Memberi bimbingan	24	19	0	43
2	Memberikan penjelasan	21	13	9	43
3	Mensosialisasikan	6	37	0	43
Jumlah		51	69	9	129
Rata-Rata		17	23	3	43
Persentase		40%	53%	7	100%

Sumber: Pengolahan data Penelitian, 2017

Berdasarkan data tabel V. 7 diatas tentang tanggapan responden indikator tentang mengangkat suatu tim menggunakan 43 responden dengan item penilaian memberi bimbingan berjumlah 19 responden menjawab cukup baik , memberikan penjelasan berjumlah 13 responden menjawab cukup baik, mensosialisasikan berjumlah 37 responden menjawab cukup baik. Sesuai dengan teknik pengukuran yang penulis tetapkan sebelumnya maka berdasarkan hasil tanggapan responden unsur pimpinan Kecamatan dan aparatur pemerintah terdapat pelaksanaan indikator mengangkat suatu tim di lihat dari tiga sub indikator dengan rata-rata 23 dari 43

responden berada pada persentase mencapai 53%. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan jawaban responden aparaturnya pemerintah kecamatan mengangkat suatu tim yang dilakukan oleh Camat selama ini sudah **cukup baik** karena Camat memberikan bimbingan kepada masyarakat mengenai program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan, bukan hanya bimbingan saja yang diberikan oleh Camat, akan tetapi juga memberi penjelasan kepada masyarakat mengenai pemberdayaan tersebut karena masih banyaknya masyarakat Kampar Kiri Hulu pada umumnya yang belum tau bahwa pentingnya pemberdayaan masyarakat beserta dengan sosialisasi dengan turun langsung kelapangan mengajak masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat seperti pengadaan sarana dan prasarana usaha tani yang ada di Desa Tanjung Belit.

3. Membuat Buku Pedoman

Membuat buku pedoman adalah buku yang berisi penjelasan tugas dari masing-masing unit, buku pedoman seperti itu di berikan kepada setiap unit untuk di pedomani dalam pelaksanaan tugas masing-masing. (Manullang). Buku pedoman merupakan yang memberikan penjelasan dari masing-masing unit untuk di pedomani dalam pelaksanaan tugas umum pemerintah oleh Camat Kampar Kiri Hulu dalam upaya mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat, oleh karena itu Camat selaku penyelenggara pemerintahan di Kecamatan harus dapat meningkatkan kinerjanya dengan melakukan koordinasi semaksimal mungkin sebelum melakukan penertiban maupun pencegahan hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan yang ada dengan upaya membuat bukun pedoman yang memuat pedoman kerja tugas dan unit masing-masing satuan kerja. Untuk

menilai tingkat pelaksanaan indikator Membuat Buku Pedoman sebagai bagian dari kegiatan koordinasi Camat dalam Pemberdayaan Masyarakat maka dapat dilihat dari tanggapan responden terhadap indikator pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Memberikan penjelasan mengenai kegiatan pemberdayaan
- b. Menentukan arah kebijakan
- c. Menjelaskan secara tertulis

Hal ini menjelaskan bahwa Camat benar-benar memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai pemberdayaan masyarakat, karena Camat mengerti seperti apa kondisi masyarakat Kampar Kiri Hulu. Oleh karena itu maka di adakan buku padoman, yang mana buku pedoman ini akan di berikan kepada masyarakat untuk membantu kelancaran pemberdayaan masyarakat yang sedang dijalani seperti pengadaan sarana dan prasarana usaha tani yang ada di Desa Gema, Desa Tanjung Belit, Desa Tanjung Belit Selatan, Desa Muara Bio, Desa Batu Sanggan, Desa Kota Lama dan Desa Aur Kuning.

Dari hasil wawancara penulis dengan Efri Desmi selaku Kepala Desa Tanjung Belit dengan pertanyaan “Apakah Camat pernah memberikan buku pedoman untuk dipedomani mengenai pemberdayaan masyarakat?”. Jawabannya sebagai berikut:

“Pembagian buku pedoman memang sudah ada di bagikan, namun untuk saat ini buku tersebut belum di pergunakan karena masyarakatnya mereka bisa tanpa buku pedoman tersebut karena mereka sudah terbiasa berkebun dan berternak,,yaa tau sendirilah masyarakat kita tidak suka hal yang rumit, mereka kerja cepat.” (Hasil wawancara 21 April 2017)

Setelah dilakukan penyebaran Kuisioner dan pengumpulan serta pengolahan data maka di dapatkan hasil jawaban responden dari unsur Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Unit Pimpinan Kecamatan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. V. 8. Distribusi frekuensi Jawaban responden penelitian mengenai membuat buku pedoman

No	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	Memberikan penjelasan mengenai kegiatan pemberdayaan	24	19	0	43
2	Menentukan arah kebijakan	10	17	16	43
3	Menjelaskan secara tertulis	16	27	0	43
	Jumlah	50	63	16	129
	Rata-Rata	17	21	5	43
	Persentase	40%	49%	11%	100%

Sumber: Pengolahan data Penelitian, 2017

Berdasarkan data tabel V. 8 diatas tentang tanggapan responden indikator tentang membuat buku pedoman menggunakan 43 responden dengan item penilaian memberikan penjelasan mengenai kegiatan pemberdayaan berjumlah 19 responden menjawab cukup baik , menentukan arah kebijakan berjumlah 17 responden menjawab cukup baik, menjelaskan secara tertulis berjumlah 27 responden menjawab cukup baik. Sesuai dengan teknik pengukuran yang penulis

tetapkan sebelumnya maka berdasarkan hasil tanggapan responden unsur pimpinan Kecamatan, aparatur pemerintah dan masyarakat terdapat pelaksanaan indikator membuat buku pedoman di lihat dari tiga sub indikator dengan rata-rata 21 dari 43 responden berada pada persentase mencapai 49%. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan jawaban responden aparatur pemerintah kecamatan mengangkat suatu tim yang di lakukan oleh Camat selama ini sudah **cukup baik** karena Camat pernah membagikan buku pedoman kepada masyarakat melalui tim yang telah di bentuk, Camat menyerahkan buku pedoman kepada tim untuk dibagikan kepada masyarakat karena dalam pengadaan usaha tani masyarakat Kampar Kiri Hulu membutuhkan buku tersebut untuk dipedomani dalam menjalankan program usaha tani.

4. Mengadakan Pertemuan Informal

Mengadakan pertemuan informal ialah Pimpinan atau atasan mengadakan pertemuan informal dengan bawahannya dalam rangka pemberian bimbingan, konsultasi dan pengarahan. (Manullang, 2008:73). Pertemuan Informal merupakan pertemuan yang diadakan tanpa terprogram dan tidak berdasarkan suatu perencanaan formal, pertemuan ini bertujuan membahas dan mencari jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang belum terselesaikan agar dapat tuntas dan hal-hal yang belum di sepakati dapat terimplementasi dengan baik.

Hal yang membedakan rapat resmi dengan rapat informal ialah jika rapat resmi yang diselenggarakan untuk membahas masalah yang sangat penting, peserta rapatnya mendapatkan pemberitahuan terlebih dahulu melalui surat

undangan. Dalam rapat resmi berlaku protokol yang membantu kelancaran rapat atau musyawarah. Apabila terdapat perbedaan pendapat diantara anggota, peraturannya adalah pendapat mayoritas menjadi keputusan, akan tetapi hak-hak minoritas dilindungi dengan pembatasan pembahasan pada pokok-pokok dan lebih penting adalah memberikan jaminan bahwa semua peserta diperlakukan sebaik-baiknya. Sedangkan rapat informal ialah rapat yang di selenggarakan oleh pimpinan dengan sifatnya serta diadakan ruang kantor pimpinan atau ruang rapat untuk membahas masalah yang mendesak atau tiba-tiba, pada rapat ini biasanya terjadi diskusi atau tukar pendapat atau informal untuk mengakrabkan pimpinan dengan stafnya dalam hal ini sekretaris hanya membuat ringkasan-ringkasan sederhana hasil rapat yang menjadi kesimpulan.

Berdasarkan observasi dilapangan, penulis menilai upaya yang dilakukan oleh Camat Kampar Kiri Hulu selama ini dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat terutama mengenai indikator mengadakan pertemuan informal untuk membahas langkah-langkah yang akan dilaksanakan, memberikan pengarahan, memberikan solusi sudah cukup berperan. Untuk menilai tingkat pelaksanaan indikator Mengadakan pertemuan informal sebagai bagian dari Koordinasi Camat Kampar Kiri Hulu dalam pemberdayaan masyarakat, maka dapat dilihat dari tanggapan responden terhadap Sub Indikator tugas sebagai berikut:

- a. Membahas langkah-langkah yang akan dilaksanakan
- b. Memberikan pengarahan

c. Memberikan solusi

Hal ini menjelaskan bahwa Camat pernah mengadakan pertemuan informal seperti yang diadakan di Desa Gema dalam kegiatan pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas umum seperti pembuatan mesjid. Disini camat langsung mengadakan pertemuan informal dengan beberapa Kepala Desa dan masyarakat setempat. Berikut penjelasan daftar hadir pada pertemuan informal yang di adakan di Desa Gema sebagai berikut:

V. 9 : Data Hadir Pertemuan Informal di Desa Gema

No	Nama	Jabatan	Kelurahan/Desa
1	Nuzum Ashal,ATH	Camat	Padang Sawah
2	Bahasri,S.Ag	Ketua Kasi Pemberdayaan	Gema
3	Efri Desmi	Kades	Tanjung Belit
4	Fandi Ardiansyah	Kades	Batu Sanggan
5	Riko Ambar	Kades	Gema
6	Wahyudi	Sekdes	Aur Kuning
7	Yusrial	Sekdes	Danau Sentul

Sumber: Kantor Camat Kampar Kiri Hulu, 2017

Dari hasil wawancara penulis dengan Rajilus Rahman selaku Kepala Desa Tanjung Belit Selatan dengan pertanyaan “Apakah Camat pernah mengadakan pertemuan informal selama pemberdayaan masyarakat berlangsung?”. Jawabannya sebagai berikut:

“ Bahwa kami pernah di datangi oleh pihak Camat selama pemberdayaan berlangsung, pihak camat sendiri yang datang memantau dan memastikan bahwa program yang sedang kami jalani berjalan sesuai harapan atau tidaknya.” (Hasil wawancara 23 April 2017)

Setelah dilakukan penyebaran kuisioner dan pengumpulan data maka di dapatkan jawaban respon penelitian dari unsur Aparatur Kecamatan dan Unit Pimpinan Kecamatan yang dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel. V.10: Distribusi frekuensi Jawaban responden penelitian mengenai mengadakan pertemuan informal

No	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Membahas langkah-langkah yang akan dilaksanakan	13	30	0	43
2	Memberikan pengarahan	6	37	0	43
3	Memberikan solusi	10	17	16	43
Jumlah		29	84	16	129
Rata-Rata		10	28	5	43
Persentase		23%	65%	12%	100%

Sumber: Pengolahan data Penelitian, 2017

Berdasarkan data tabel V. 10 diatas tentang tanggapan responden indikator tentang mengadakan pertemuan informal menggunakan 43 responden dengan item penilaian membahas langkah-langkah yang akan dilaksanakan berjumlah 30 responden menjawab cukup baik , memberi pengarahan berjumlah 37 responden menjawab cukup baik, memberikan solusi 17 responden menjawab cukup baik. Sesuai dengan teknik pengukuran yang penulis tetapkan sebelumnya maka berdasarkan hasil tanggapan responden unsur pimpinan Kecamatan, aparatur pemerintah dan masyarakat terdapat pelaksanaan indikator mengadakan pertemuan informal di lihat dari tiga sub indikator dengan rata-rata 28 dari 43 responden berada pada persentase mencapai 65%. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan jawaban responden aparatur pemerintah kecamatan mengadakan pertemuan

informal yang di lakukan oleh Camat selama ini sudah **cukup baik** karena Camat menjalani Tugasnya cukup baik karena dengan adanya pertemuan informal yang di lakukaun oleh Camat dengan instansi terkait telah membuktikan bahwa Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Cukup Baik. Karena dalam mengadakan pertemuan informal antara Camat dan Masyarakat bisa langsung bertukar pikiran, disini Camat membahas langkah-langkah yang akan dilaksanakan untukn kedepannya dalam menjalani program pemberdayaan masyarakat, memberikan pengarahan kepada masyarakat bahwa pemberdayaan itu sangat perlu dalam proses perkembangan di suatu Desa dan memberikan solusi yang tepat atas keluhan masyarakat atas keterbatasan yang ada di Desa mereka masing-masing.

Dengan adanya pertemuan informal ini akan membantu menyelesaikan masalah yang tengah dihadapi oleh masyarakat selama program pemberdayaan berlangsung seperti pengadaan sarana dan prasaran fasilitas umum dalam pembuatan jembatan di Desa Tanjung Belit.

Berdasarkan penjelasan dan uraian dari sub indikator diatas yang digunakan untuk melihat Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Di kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar, maka dapat dilihat dari rekapitulasi jawaban keseluruhan responden dari unsur Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Unsur Masyarakat mengenai indikator pengadaan pertemuan informasi dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

C. Rekapitulasi Hasil Pembahasan

Berdasarkan penjelasan dan uraian dari keempat indikator yang digunakan untuk melihat Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar, maka dapat dilihat dari rekapitulasi jawaban keseluruhan responden sebagai berikut:

Tabel. V. 11: Distribusi frekuensi Jawaban responden penelitian Mengenai Tugas Camat dalam Mengordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar

No	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Mengadakan pertemuan	13	30	0	43
2	Mengangkat suatu tim	17	23	3	43
3	Membuat buku pedoman	17	21	5	43
4	Mengadakan pertemuan informal	10	28	5	43
Jumlah		57	102	13	172
Rata-Rata		14	26	3	43
Persentase		33%	60%	7%	100%

Sumber: Pengolahan data Penelitian, 2017

Dari tabel V.11 diatas terlihat bahwa jawaban responden yang mendominasi untuk rekapitulasi jawaban mengenai tugas camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar adalah kategori **Cukup Baik** dengan rata-rata 26 atau 60%. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar secara keseluruhan ada pada kategori **CUKUP BAIK**.

D. Faktor Pendukung Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

Setelah melakukan penelitian mengenai Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar penulis menemukan beberapa faktor pendukung kegiatan pemberdayaan yang ada di Kecamatan Kampar Kiri Hulu sebagai berikut:

1. Karena faktor ekonomi dan perkembangan masyarakat di Kecamatan Kampar Kiri Hulu yang masih kurang memadai dan sudah seharusnya diberdayakan.
2. Karena di Kecamatan Kampar Kiri Hulu mempunyai tanah yang subur dan luas untuk pertanian maka dari itu di adakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang usaha tani seperti penanaman jagung, sawit, karet dan durian.
3. Masyarakat Kecamatan Kampar Kiri Hulu masih terkenal akan adat istiadat, sosial dan budaya. Sifat tolong menolong, tau mana hak mereka mana hak orang lain, hal seperti itu masih ciri khas dari masyarakat Kecamatan Kampar Kiri Hulu, oleh karena itu diadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang usaha ternak, yang mana ternak mereka bebas berkeliaran di sekitar Desa, tak akan terjadi pertukaran hewan ternak mereka masing-masing.

E. Faktor Penghambat Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

Setelah melakukan penelitian mengenai Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar penulis menemukan beberapa hambatan-hambatan sebagai berikut:

1. Jarak yang jauh antara Desa-Desa yang ada Di Kecamatan Kampar Kiri Hulu membuat komunikasi antar Pemerintah Kecamatan dan Desa semakin jauh, oleh karena itu jarang nya pertemuan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan dan Desa-Desa.
2. Kurangnya ide-ide dan saran dari pihak masyarakat untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, hal ini terjadi karena masyarakat masih banyak yang belum tau bahwasannya ada pemberdayaan di Desa mereka masing-masing.
3. Karena jarak tempuh yang jauh dari Kecamatan maka tidak semua Desa yang ada di Kecamatan Kampar Kiri Hulu yang bisa mendapatkan Pemberdayaan yang ada, karena mereka ketinggalan informasi.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian mengenai Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar cukup baik hal ini dapat di buktikan adanya pertemuan-pertemuan baik itu pertemuan formal maupun informal antara Camat dengan Aparat Desa dan masyarakat untuk mengkoordinasi mengenai pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar, sehingga program-program mengenai pemberdayaan masyarakat cukup terlaksana
2. Hasil penelitian ini didapat dari 4 (empat) indikator yaitu mengadakan pertemuan resmi, mengangkat suatu tim, membuat buku pedoman dan mengadakan pertemuan informal, dan di dukung oleh Kepala Desa dan Masyarakat setempat dalam proses pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar sehingga pemberdayaan di Kecamatan tersebut sudah mulai membaik.

B. Saran

Dari hasil penelitian tersebut dan dari fenomena yang ada maka dapat disarankan bahwa:

1. Camat perlu mempertahankan kinerjanya mengenai pemberdayaan masyarakat karena termasuk cukup baik, hal ini dibuktikan karena instansi terkait ikut dalam koordinasi terutama kepada Aparat Desa yang ada di Kecamatan Kampar Kiri Hulu.
2. Pertemuan atau rapat yang dilakukan oleh Camat seharusnya secara rutin dilakukan dengan instansi terkait yang berkaitan dengan pelaksanaan koordinasi pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kampar Kiri Hulu, dan diharapkan Camat untuk mengundang semua unsur yang terlibat mulai dari jajaran Aparatur Kecamatan, Aparatur Pemerintah Desa serta tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Kampar Kiri Hulu.
3. Kepada pihak pemerintah Kecamatan dan Desa dapat memberikan informasi secara jelas kepada masyarakat agar tidak terjadi komunikasi yang salah.
4. Kepada masyarakat untuk dapat lebih aktif dalam mengikuti dan mendukung serta memberikan masukan kepada Pemerintah Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar untuk dapat mensukseskan kegiatan pemberdayaan masyarakat di setiap Desa-Desa.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Daryanto, Abdullah. 2013. *Pengantar Ilmu Pemerintahan dan Komunikasi*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Djamin, Awaludin. 2005. *Koordinasi Dalam Berbagai Pandangan*. Raja Grafindo: Jakarta.
- Dunn, William. N, 2003. *Analisis Kebijakan Publik*, Cetakan Ke-10 Yogyakarta, Hanindita
- Hamdi, Muchlis, dkk,1999. *Kebijakan Publik : Selayang Pandang*. Widya Praja Edisi ke 33. Jakarta : IIP Depdagri.
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen Edisi II*. Yogyakarta: BPFE
- Hasibuan, Malayu. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hasibuan, Melayu S.P, 2006. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, Edisi Revisi*, Jakarta : BUmi Aksara.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Jakarta : Erlangga
- Manullang, 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia
- Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jilid 1, Jakarta : Rineka Cipta.
- Ndaraha, Taliziduhu, 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jilid 2, Jakarta : Rineka Cipta.
- Ndaraha, Taliziduhu, 2005. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan)*. Jilid 2. PT. Rineka Cipta : Jakarta
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : Elek Media Komputindo.
- Rasyid, M.Ryass, 1997. *Makna Pemerintahan : Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta : PT. Yasrif Watampone.
- Riyadi dan Deddysupriady Bratakusumah, 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta, PT Gramedi
- Sedarmayanti, 2004. *Good Governance (Pemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung, Mandar Maju.

Sigian P.Sondang,2003.*Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. CV. Haji Masagung, Jakarta.

Sjafrizal, 2014.*Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soejono, 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. Raja Grafindo Prasada, Jakarta.

Soekanto, Soejono, 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Soetomo, 2006. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Soetomo, 2011. *Pemberdayaan Masyarakat akan muncul Antitesisnya*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Suharto, Edi, 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta.

Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung, PT. Refika Aditama.

Syafiie , Inu Kencana, 2007. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung, Sumber Sari Indah.

Widjaja, H.A.W.2003. *otonomi Desa*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Widjaja, H.A.W, 2005. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Dokumentasi dan Perundang-Undangan :

Buku Pedoman Penulisan Edisi Revisi. 2013. Pekanbaru, UIR Press.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.

Peraturan Bupati Kampar Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Alih Fungsi SKB

Arif Ramanta Asari, 2016. *Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak*. Skripsi: UIR

M. Taufik Panji Alamsyah, 2016. *Peranan Camat Dalam Mengkoordinasi Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir*. Skripsi: UIR

Siti Nurul Istiah. 2015. *Analisis Tugas Camat Dalam Mengkoordinasi Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis*. Proposal:UIR



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau